

Usaha-usaha Mempromosikan  
**ISLAM MODERAT, TOLERANSI  
DAN MULTIKULTURALISME**  
di Indonesia dan Australia

Studi Kasus Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung  
dan Centre for Islamic Thought & Education (CITE),  
University of South Australia Adelaide

Penulis :

1. H. Usep Dedi Rostandi, MA
2. Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag
3. Husnul Qodim, MA
4. Muhammad Ali Nurdin, Ph.D

**USAHA-USAHA MEMPROMOSIKAN  
ISLAM MODERAT,  
TOLERANSI DAN MULTIKULTURALISME  
DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

**Studi Kasus Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung dan  
Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of  
South Australia Adelaide**

**Penulis**

**H. Usep Dedi Rostandi, MA  
Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag  
Husnul Qodim, MA  
Muhammad Ali Nurdin, Ph.D**

**Penerbit:**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
2018**

**USAHA-USAHA MEMPROMOSIKAN ISLAM MODERAT,  
TOLERANSI DAN MULTIKULTURALISME  
DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

**Studi Kasus Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung dan Centre  
for Islamic Thought & Education (CITE), University of South  
Australia Adelaide**

**ISBN 978-602-51607-1-4**

**Tim Penulis:**

H. Usep Dedi Rostandi, MA  
Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag  
Husnul Qodim, MA  
Muhammad Ali Nurdin, Ph.D

**Tata Letak:**

**Busro**

**Desain Sampul:**

Abdul Wasik

**Penerbit:**

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Alamat Redaksi:**

Laboratorium Fak.Ushuluddin  
Lantai 4 Gedung Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru Bandung  
Email: labushuluddin@uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, Maret 2018

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data.....	22
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	24
D. Langkah-langkah Penelitian .....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	26
A. Islam di Indonesia dan Australia .....	26
B. Agen-agen Islam Moderat di Indonesia.....	29
1. Institusi Pendidikan (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) ..	29
2. Deklarasi Islam Moderat .....	32
3. Kurikulum Islam Moderat .....	36
4. Peran Kampus: Kasus Fakultas Ushuluddin UIN Bandung.	41
5. Organisasi Massa (NU, Muhammadiyah Bandung).....	45
C. Agen-agen Islam Moderat di Adelaide.....	54
1. Abdalla: Ikon CITE dan Tokoh Muslim Moderat Australia dalam “ <i>Building Bridges between Cultures</i> ” .....	56
2. Dr. Dylan Chown .....	65
3. Dr. Mahmood Nathie.....	66
4. Dr. Nada Ibrahim .....	67
D. Fokus Riset CITE: Dari Hubungan Islam dan Barat Sampai Kekerasan Domestik .....	68
1. Riset Pembaharuan Sekolah Islam.....	69
2. Riset Keuangan Islam .....	70
3. Riset tentang kepemimpinan dalam Organisasi Islam .....	71
4. Riset tentang Kekerasan dalam keluarga multikultur .....	71
E. Usaha-Usaha Yang dilakukan Agen Islam Moderat	

di Bandung.....	72
Tantangan yang dihadapi di Indonesia .....	81
F. Usaha-usaha Yang Dilakukan oleh Agen Islam Moderat	
Adelaide.....	83
1. <i>Australian Islamic Education Forum</i> .....	83
2. <i>Annual Australian Islamic Schooling Conference</i> .....	86
3. <i>New Teacher Training Program</i> .....	92
BAB V KESIMPULAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	102

## KATA PENGANTAR

Puji sukur kupersembahkan pada Allah SWT, Yang mengendalikan segala maksud dan sesuatu terwujud, atas kehendakNya laporan penelitian ini bisa terselesaikan saat ini. Penelitian ini didanai dari anggaran BOPTN UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Munir MA., Ketua LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Bapak Dr. Wahyudin Dharmalaksana, M.Ag., Kepala Pusat Penelitian UIN SGD Bandung. Kedua institusi tersebut, yang paling berjasa terhadap hadirnya laporan penelitian ini, khususnya kepada Kapuslit beserta staffnya yang telah banyak membantu dan mendorong terwujudnya laporan penelitian ini. Tidak lupa kepada Bapak Cecep, kepala pengelola Dompot Dhu'afa Australia, yang menerima kami selama di Sydney Australia. Kemudian Bapak Tufel Musyadad (Ketua PCI NU Australia), Ibu Roswita Nimpuno Khayyath (Direktur Australindo) dan Mr. John (suami Bu Roswita), dan sahabat-sahabat komunitas KIA (Kajian Islam Adelaide), yang telah menyambut dan menemani dengan baik selama penelitian kami di Adelaide.

Tanpa bantuan dan dukungan mereka semua, mungkin kami tidak akan bisa menyelesaikan laporan penelitian ini, dan kepada mereka semua kami ucapkan banyak terima kasih.

Demikian juga, ucapan terima kasih perlu kami sampaikan kepada Prof Mohamad Abdalla, direktur Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia, beserta para professor dan staf CITE yang telah sudi menerima kunjungan dan membantu penelitian kami di CITE-University of South Australia, Adelaide. Tanpa bisa menyebut satu per-satu, kami juga sangat berterima kasih kepada teman-teman Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas diskusi-diskusinya. Merekalah yang banyak memberikan pengalaman dan membuat suasana belajar menjadi sangat kondusif untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman kami.

Setiap langkah manusia tidak pernah terlepas dari keterbatasan, subyektifitas dan kesalahan, termasuk

subyektifitas dan kesalahan penulis dalam penulisan hasil penelitian ini, meskipun telah berusaha penulis hindari, sehingga kritik dan saran dari pembaca selalu penulis harapkan. Peneliti berharap laporan ini memberikan sumbangan akademik yang berarti bagi kajian-kajian antropologi sosial dan agama selanjutnya. Dan semoga akan bermanfaat bagi kajian-kajian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Ruang dialog dan diskusi, saran dan kritik, selalu terbuka untuk perbaikan tulisan ini di masa kemudian.

Cibiru, 09 Nopember 2017

**Tim Penulis**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang multikultur dengan keanekaragaman budaya dan agama, sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya dengan nilai-nilai budaya. Keanekaragaman budaya ini tentunya akan menghasilkan sebuah tatanan kemasyarakatan yang heterogen yang apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan sebuah tatanan masyarakat yang dinamis dan integratif. Sebaliknya, apabila keanekaragaman tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat merugikan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.<sup>1</sup> Multikulturalisme adalah sebuah wacana kebudayaan, yaitu paham tentang keanekaragaman budaya. Sebuah paham yang menekankan komitmen kesetaraan antar keanekaragaman budaya yang ada di sebuah komunitas masyarakat yang heterogen dengan menghargai hak-hak dan eksistensi budaya yang ada.

Multikulturalisme juga dapat menjadi konsep ideologi kebangsaan dimana sebuah komunitas dalam konteks berbangsa dan bernegara (*nation and state*) telah mengakui berbagai keragaman dan kemajemukan budaya, dari beragam suku, agama, ras maupun antar golongan. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok suku, agama, ras dan golongan (*ethnic and cultural groups*) yang bisa hidup saling berdampingan dengan damai dan bersedia saling menghargai perbedaan serta menghormati eksistensi budaya lain dalam prinsip koeksistensi.

---

<sup>1</sup>Melalatoa, M.Yunus. 2002. *Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia*. Jilid L-Z.

Indonesia adalah bangsa yang multikultur, dalam konteks kehidupan berbangsa dan berbudaya telah menganut multikulturalisme sebagai ideologi nasional. Dengan simbol yang telah disepakati bersama, yaitu Bhineka Tunggal Ika, bangsa Indonesia memiliki komitmen politik kebudayaan untuk mengakui berbagai keragaman budaya, baik suku, etnik, agama, ras dan gender dalam satu tujuan bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden. Sementara dalam kehidupan bernegara menganut sistem demokrasi berdasarkan azas Pancasila, dimana nilai-nilai keagamaan menjadi azas utama dalam kehidupan bernegara yang tercermin dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di Indonesia agama memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Peranan agama sangat berpengaruh secara kolektif dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya.

Salah satu agama yang cukup berpengaruh adalah Islam. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, dan memiliki pengaruh paling dominan secara sosial, politik dan budaya. Menurut hasil sensus tahun 2010, dari 237.641.326 penduduk Indonesia, sejumlah 207.176.162 (87,18%) adalah pemeluk Islam; sejumlah 16.528.513 (6,96%) pemeluk Protestan; sejumlah 6907873 (2,9%) pemeluk Katolik; sejumlah 4.012.116 (1,69%) pemeluk Hindu; sejumlah 1703254 (0,72%) pemeluk Buddha; sejumlah 117.091 (0,05%) pemeluk Kong Hu Cu; sejumlah 299.617 (0,13%) pemeluk agama lainnya; sejumlah 139582 (0,06%) tidak terjawab; dan sejumlah 757.118 (0,32%) tidak ditanyakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Lihat <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menu-rut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id>, diakses 25 April 2017.

Sedangkan Australia, adalah bangsa yang multikultur, dimana dalam konteks kehidupan berbangsa dan politik kebudayaannya sama-sama menganut multikulturalisme sebagai ideologi nasional, seperti halnya di Indonesia. Negara Australia merupakan negara yang berbentuk persemaikmuran dengan monarki konstitusional (the Commonwealth of Australia), yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal mewakili Ratu Inggris. Sedangkan, dalam konteks pemerintahannya, pemerintahan Australia dipimpin oleh Perdana Menteri dengan sistem parlemen. Berbeda dengan di Indonesia, dalam kehidupan bernegara menganut sistem demokrasi liberal, yaitu sistem demokrasi yang tidak menganut atau bersumber pada nilai-nilai agama. agama tidak terlalu berperan dalam kebijakan politik, ekonomi dan budaya. Tidak ada agama yang diakui secara resmi oleh negara, warga negara memiliki kebebasan untuk menganut agama apapun yang mereka pilih termasuk bebas untuk tidak menganut agama apapun.

Di Australia, semua agama diberi kebebasan untuk hidup selama mereka mematuhi hukum, dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Australia. Meski agama tidak memiliki peranan signifikan dalam kebijakan politik ekonomi Australia, namun di Australia juga dihadapkan pada kenyataan mengenai problem mayoritas dan minoritas, dimana keberpihakan kebijakan politik ekonomi Australia juga lebih berpihak pada masyarakat mayoritas yang beretnik Anglo dan beragama Kristen. Secara umum, data sensus penduduk tahun 2006 menunjukkan bahwa agama mayoritas di Australia adalah pemeluk agama Kristen. Prosentase pemeluk agama dari seluruh jumlah penduduk di Australia adalah sebagai berikut: Katolik

(25,8%), Anglikan (18,7%), Gereja Pemersatu (5,7%), Budha (2,1%), Islam (1,7%) dan Hindu (0,7%).<sup>3</sup>

Berdasarkan data tersebut, Islam di Australia adalah agama minoritas yang dipeluk oleh sekitar 340.000 jiwa (1,7%) dari keseluruhan jumlah penduduk. Muslim di Australia juga sangat beragam, dari data tersebut tercatat 128.904 (40%) lahir di Australia dan 60% sisanya lahir dari luar Australia (penduduk migran). Kebanyakan dari mereka adalah migran dari Libanon dan Turki, sedangkan lainnya adalah 15.965 dari Afganistan, 13.821 dari Pakistan, 13.361 dari Banglades, 10.039 dari Irak, kemudian 8.656 dari Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam tiga dekade terakhir memang banyak muslim melalui program pengungsi dan kemanusiaan telah bermigrasi ke Australia dari negara-negara Afrika yang mayoritas muslim, seperti Somalia dan Sudan. Kebanyakan muslim di Australia hidup di Sydney dan Melbourne. Mereka telah banyak membangun masjid dan sekolah, serta telah memberikan sumbangsih nilai dan warna budaya dalam kehidupan multikultural di Australia.<sup>5</sup> Namun, sebagai kelompok minoritas, Muslim di Australia tidak memiliki saluran politiknya baik di parlemen maupun legislatif. Sehingga, secara politik, aspirasi Muslim di Australia tidak tersalurkan secara baik karena hanya menjadi pemilih saja.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Kedutaan Besar Australia Indonesia, Kebebasan Agama di Australia, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan\\_beragama.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html), diakses 28 April 2017.

<sup>4</sup> Kedutaan Besar Australia Indonesia, Kebebasan Beragama di Australia, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan\\_beragama.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html)

<sup>5</sup> Kedutaan Besar Australia Indonesia, Muslim di Australia, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/Muslim di Australia.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/Muslim%20di%20Australia.html), diakses 28 April 2017

<sup>6</sup> Imam Pratio, Sejarah Islam di Australia, 8 april 2011, <https://islam33.wordpress.com/2011/04/08/sejarah-islam-di-australia/>, Diakses 26 April 2017.

Baik di Indonesia maupun di Australia, konsep multikulturalisme sebagai ideologi nasional merupakan sebuah kebutuhan, melihat realitas masyarakatnya yang beranekaragam dan majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok suku, agama, ras dan golongan (*ethnic and cultural groups*) bisa hidup saling berdampingan dengan damai dan harmonis. Dalam konteks inilah, peran negara dan berbagai kelompok masyarakat di dalamnya agar berperan serta untuk menjadikan ideologi multikulturalisme ini sebagai kekuatan membangun bangsa dan negara. Namun demikian, kenyataan kadang berbeda dengan konsep multikulturalisme sebagai ideologi nasional yang diangankan.

Di Indonesia misalnya, gagasan multikulturalisme sebagai ideologi nasional belum dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenyataannya, kemajemukan belum secara sungguh-sungguh dijadikan kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. sebagian kelompok masyarakat, memahami dan menganggap kemajemukan sebagai sumber permasalahan bahkan konflik. Sebagian kelompok masyarakat lain, masih memperdebatkan gagasan demokrasi dan multikulturalisme sebagai ideologi nasional. Seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia bersama kelompok-kelompok Islam radikal lainnya, masih menganggap demokrasi dan ide multikulturalisme sebagai akar masalah ketidakadilan, dan berusaha menyuarkan ideologi Islam, seperti konsep khilafah, sebagai satu-satunya alternatif mengatasi masalah ketidakadilan.

Wacana demokrasi, toleransi dan multikulturalisme sebagai gagasan untuk kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara belum dipahami dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sehingga kehidupan yang damai dan toleran antar beragam budaya, baik suku, etnik, agama, ras dan

golongan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2016, yang berjudul '*Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia*' ditemukan sejumlah data yang menyatakan semakin menguatnya intoleransi di kalangan Muslim di Indonesia. Data survey menyatakan dari total 1.520 responden Muslim, 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci dari yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok Tionghoa, komunis, dan selainnya. Dari 59,9 persen itu; sejumlah 92,2 persen tidak setuju bila dari kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintahan, dan sejumlah 82,4 persen tidak rela bila dari kelompok tersebut hidup bersama dan menjadi tetangga mereka.<sup>7</sup> Bahkan akhir-akhir ini intoleransi memiliki kecenderungan menguat dengan semakin menguatnya isu politisasi agama dalam pilkada DKI Jakarta April 2017 kemarin, ditambah lagi semakin menguatnya eskalasi politik di tingkat nasional menjelang pemilu 2019.

Sementara itu di Australia, diskursus Islam, demokrasi dan multikulturalisme di Australia menampilkan wajah yang berbeda. Di satu sisi, Muslim di Australia sebagaimana di negara eropa yang lain berposisi sebagai kelompok minoritas. Di sisi lain, dianggap sebagai komunitas etnik pendatang yang berbeda dengan budaya eropa pada umumnya. Dalam pengamatan Shahram Akbarzadeh tahun 2009,<sup>8</sup> Dia menggambarkan gagasan tentang multukulturalisme sebagai ideologi nasional telah menampilkan kontradiksinya, di satu sisi dipromosikan oleh negara, di sisi lain, lebih sebagai integrasi

---

<sup>7</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi Dan Radikalisme", opini Kompas Online, 1 Agustus 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme?page=all>, diakses 05 Oktober 2016.

<sup>8</sup> Akbarzadeh, Shahram, *Islam in Australia, in Australia and the Arab world*, (I. B. Tauris, London, England, 2009)

sosial pada yg lain. Kenyataannya, lebih sebagai promosi identitas etnik Anglo yang membutuhkan integrasi dari etnik minoritas ke dalam masyarakat yang lebih besar.

Di Australia, Isu-isu politik memberikan tantangan baru bagi multikulturalisme, isu terorisme bom 11 September, bom Bali, Madrid dan London mendorong pemerintah Australia yang liberal membuat kebijakan-kebijakan politik dalam maupun luar negeri yang dianggap merugikan umat Islam di Australia. Keterlibatan Australia dalam perang anti terorisme ke Irak dan Afghanistan, serta undang-undang anti terror dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pentargetan warga muslim Australia.<sup>9</sup> Kampanye negara Barat yang terus menerus untuk memberlakukan undang-undang khusus bagi muslim yang tinggal di Barat, termasuk di Australia, menjadikan masyarakat muslim yang tinggal di negara tersebut merasa khawatir dan mengalami perlakuan berbeda dari masyarakat lainnya. Ini juga terjadi di sekolah-sekolah muslim di Australia, dimana pemerintah berusaha meninjau kembali kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah Islam. Tidak sampai di situ, anggota parlemen dari partai Liberal Bronwyn Bishop mengusulkan pelarangan memakai jilbab bagi muslim yang sekolah di sekolah-sekolah umum.<sup>10</sup> Berbagai peristiwa tersebut menyebabkan perdebatan terkait isu multikulturalisme dan toleransi di Australia menjadi perdebatan yang hangat kembali.

Oleh karena itu, pengalaman dan tantangan umat Islam yang berbeda antara di Indonesia dan Australia terkait isu demokrasi, toleransi dan multikulturalisme, serta pengalaman kedua negara tersebut dalam mengimplementasikan konsep multikulturalisme sebagai ideologi nasionalnya, sehingga

---

<sup>9</sup> Imam Pratio, Sejarah Islam di Australia, 8 april 2011, <https://islam33.wordpress.com/2011/04/08/sejarah-islam-di-australia/>, Diakses 26 April 2017, hal.7.

<sup>10</sup> Imam Pratio, Sejarah Islam di Australia, 8 april 2011, <https://islam33.wordpress.com/2011/04/08/sejarah-islam-di-australia/>, Diakses 26 April 2017, hal. 10.

mendapatkan respon yang berbeda dari kalangan muslim yang menjadi warga negara dari kedua negara tersebut, menjadi isu yang hangat dan seringkali pula menjadi kajian yang selalu didiskusikan di Perguruan Tinggi.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam terbesar di Indonesia juga terlibat dalam pergulatan wacana Islam, Demokrasi, dan Toleransi dalam upaya memelihara harmoni sosial dalam keberagaman dan kebinekaan masyarakat Indonesia. Sementara itu Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia merupakan lembaga kajian yang dikelola oleh komunitas muslim di bawah UniSa (University of South Australia) yang memiliki konsen terhadap studi Islam dalam konteks Australia dengan tujuan memberdayakan masyarakat muslim yang minoritas menghadapi berbagai tantangan dalam konteks masyarakat Australia yang juga beragam dan multikultur. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana wacana Islam, demokrasi, dan toleransi yang berkembang di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai representasi konteks Indonesia, dan bagaimana yang berkembang di Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia. Kemudian upaya-upaya dan sumbangsih apa saja yang dilakukan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk konteks Negara Indonesia, dan yang dilakukan oleh Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia untuk konteks Negara Australia, terkait pengembangan wacana tersebut dalam upaya membangun harmoni dan mempromosikan ideologi multikulturalisme, keragaman, kebinekaan sebagai ideologi nasional.

Menariknya lagi, ada pengalaman yang berbeda antara Indonesia dan Australia, dimana posisi masyarakat Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas sementara di Australia

sebagai kelompok minoritas dalam negara yang sama-sama multikultur dengan konsep demokrasi dan multikulturalisme sebagai ideologi nasional

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa itu konsep multikulturalisme dan “Islam moderat”? Kapan, mengapa, faktor-faktor apa saja dan bagaimana wacana ini muncul di Indonesia? Dan mungkin juga muncul di Australia.
2. Bagaimana upaya-upaya pengembangan akademik dan sumbangsih apa saja yang dilakukan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia, berhubungan dengan gagasan Islam moderat dan multikulturalisme sebagai ideologi nasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dinamika wacana Islam Moderat, Toleransi dan multikulturalisme dan pengembangannya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia berhubungan dengan gagasan demokrasi dan multikulturalisme sebagai ideologi nasional.
2. Untuk mengetahui pengalaman yang berbeda dari dua lembaga Perguruan Tinggi Islam tersebut tentang upaya-upaya dan sumbangsih apa saja yang dilakukan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk konteks Negara Indonesia, dan yang dilakukan oleh Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia untuk konteks Negara Australia, terkait

pengembangan wacana tersebut dalam upaya membangun harmoni dan mempromosikan ideologi multikulturalisme, keragaman, kebinekaan sebagai ideologi nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademik, dalam pendekatan sosiologis antropologis tentang konsep Mayoritas dan Minoritas, penelitian ini dapat memberi gambaran tentang pengalaman dari dua lembaga akademik yang berbeda, UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai representasi konteks Indonesia (sebagai kelompok mayoritas) dan Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia di Australia sebagai representasi konteks Australia (sebagai kelompok minoritas) dalam upayanya membangun harmoni di negara multikultur yang menerapkan konsep demokrasi dan multikulturalisme sebagai ideologi nasional.
2. Manfaat praktisnya, adalah dengan mengetahui pengalaman dari dua komunitas Muslim yang berbeda di Indonesia (sebagai kelompok mayoritas) dan di Australia (sebagai kelompok minoritas) di negara multikultur yang menerapkan konsep demokrasi dan multikulturalisme sebagai ideologi nasional dapat memberikan gambaran tentang solusi yang tepat dalam membangun kehidupan yang damai dalam masyarakat yang multi-kultur.
3. Manfaat kelembagaan, dengan adanya penelitian kolaboratif awal untuk saling belajar dan *sharing* bersama dalam memahami Islam, demokrasi dan toleransi serta

pengalaman pengembangannya yang berbeda dari dua lembaga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk konteks Negara Indonesia, dan Centre for Islamic Thought & Education (CITE), University of South Australia untuk konteks Negara Australia, terkait pengembangan wacana tersebut dalam upaya membangun harmoni dan mempromosikan ideologi multikulturalisme, keragaman, kebinekaan sebagai ideologi nasional. Dan hasilnya akan menjadi bahan bersama untuk saling kerja sama dalam pengkajian dan penelitian kolaboratif dalam tema besar yang sama ke depan.

## **E. Kerangka Konseptual Penelitian**

Konsep mengenai 'Islam Moderat' dan 'Islam Toleran' merupakan konsep yang hangat diperdebatkan dan memunculkan banyak interpretasi. Secara terminologi, kata 'moderat' berarti selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yg ekstrem; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, atau pandangan yang mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.<sup>11</sup> Sedangkan kata 'toleran' berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yg berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.<sup>12</sup> Kata 'moderat' lebih menekankan pada pandangan atau sikap menghindari dari perilaku atau ungkapan ekstrem ke arah jalan tengah atau perdamaian, sedangkan kata 'toleran' lebih menekankan pada pandangan dan sikap untuk menghargai pendapat yang berbeda dengan pendirian sendiri. Konsep Islam moderat dan Islam

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, software, offline.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, software, offline.

toleran merupakan konsep satu kesatuan konsep yang sama dan seiring sejalan, yaitu model keberagamaan Islam yang berkecenderungan ke arah jalan tengah dan kedamaian sebagaimana pesan universal Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, keberagamaan yang dapat menghargai pendapat yang berbeda, serta menolak model keberagamaan yang ekstrem dan radikal.

Batas definisi yang tegas dikemukakan oleh Esposito, muslim moderat yaitu mereka yang menolak model keberagamaan yang ekstrem dan menyatakan kekerasan dan terorisme sebagai pandangan dan perilaku yang tidak dibenarkan agama.<sup>13</sup> Hal senada juga di kemukakan Fuller, Muslim moderat adalah mereka yang menolak gagasan kebenaran tunggal dari kelompok atau individu yang memonopoli definisi Islam, dan lebih mengutamakan untuk mencari pokok-pokok persamaan dengan kelompok keyakinan lain ketimbang mencari pokok-pokok perbedaannya.<sup>14</sup> Baik Esposito maupun Fuller memberikan definisi Islam moderat dan toleran dengan batas yang tegas untuk membedakan (antonim) dengan definisi Islam radikal.

Definisi Islam radikal secara umum memiliki empat ciri atau platform yang seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok radikal, yaitu:

- Pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi keagamaan secara literal, dan menolak pembacaan konteks yang melingkupi setiap teks, sehingga dapat mereduksi pesan dan kesakralan teks agama
- Kedua, menolak pluralitas dan relativitas pemahaman.

---

<sup>13</sup> John L. Esposito, ed., *Siapakah Muslim Moderat?*, Bogor: Kultura.

<sup>14</sup> Graham E. Fuller, "Freedom and Security: Necessary Conditions for Moderation", *The American Journal of Islamic Social Sciences* 22:3, 21-22.

- Ketiga, mereka memonopoli kebenaran interpretasi agama. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya yang memiliki otoritas kebenaran dan mengatakan bahwa pemahaman kebenaran dari teks keagamaan yang mereka pahami adalah final dan tidak mungkin berubah.
- Keempat, gerakan-gerakan mereka seringkali berkaitan dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleransi, radikalisme, and militaristik.

Di Indonesia, ciri-ciri diatas bisa kita temukan dalam kelompok-kelompok keagamaan seperti, MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad, dan kelompok radikal lainnya yang memiliki beberapa ciri diatas.

Pandangan yang agak berbeda dikemukakan oleh Fazlur Rahman bahwa istilah Islam moderat sama dengan Islam neo-modernis. Neo-modernis yang dimaksud adalah gambaran Islam di Indonesia atas respon terhadap modernisasi Islam, yang terdiri dari dua kelompok Islam Indoensia, yaitu; kelompok yang menolak atas modernisasi Islam dan setia terhadap ketradisionalannya, dan kelompok yang menelan mentah-mentah arus Islam modern. Islam yang neo-modernis merupakan kelompok Islam yang mampu menghadapi tantangan modernisasi Islam tetapi tetap berpijak pada ketradisionalannya atau teguh terhadap keotentikan Islam Indoneisa.<sup>15</sup>

Sementara Nasaruddin Umar, mengemukakan poin penting yang berkenaan dengan Islam moderat. Islam moderat tidak identik dengan Islam liberal, Islam moderat mengedepankan sikap toleran segala aspek kehidupan mencakup agama, sosial, budaya, dan lainnya. Islam moderat, merupakan jalan tengah, tunduk dengan kritis, dan pasrah dengan nilai-nilai

---

<sup>15</sup> Hilaly Basya, *Menelusuri Artikulasi Islam Moderat*, <http://www.205-Article%20Text-1198-1-10-20170213.pdf>. diakses tanggal 25 November 2017.

ajaran Islam.<sup>16</sup> Hal senada ditawarkan oleh Syafi'i Ma'arif dalam konteks ke-Indonesia-an dengan mengajak "ber-Agama Islam dalam Bingkai Keindonesiaan".<sup>17</sup> Penyebaran Islam di Indonesia identik dengan kedamaian, tidak memaksa pemeluk agama lain untuk masuk Islam dan menghargai budaya, bahkan mengakomodasikannya kedalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. Semua itu dilakukan oleh para ulama Islam Indonesia, karena sikap toleran seorang ulama, maka banyak masyarakat yang simpatik untuk masuk agama Islam. Maka terlihatlah karakter asli Islam Indonesia yakni "Islam Moderat", disebut moderat, karena lebih menggunakan pendekatan pendidikan dan transformasi budaya.

Dari beberapa pandangan intelektual diatas, secara konseptual Islam moderat adalah sebuah rumusan yang memiliki spektrum luas dan kompleks. Tidak saja menysasar aspek keyakinan/aqidah, tetapi juga menysasar aspek pemahaman terhadap doktrin-doktrin syariah itu sendiri. Bahkan, dalam konteks kebangsaan, Islam moderat menysasar isu keragaman, masyarakat sipil, dan lainnya. Jadi, kontruksi Islam moderat sebagai model ekspresi keberagaman hanya bisa diwujudkan jika menjadi instrumen penting dalam proses pendidikan dan penyebaran Islam di Indonesia. Gambaran umum tentang Islam moderat adalah pemahaman dan prilaikku keberagaman yang melahirkan sikap toleransi dalam menghadapi keragaman, terutama menyangkut isu pluralisme agama, sehingga mewujudkan nilai-nilai damai dalam Islam. Banyak rujukan naqliah yang dapat dihadirkan untuk mendukung kesimpulan ini. Bahkan, moderasi Islam ini seiring dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan—

---

<sup>16</sup> Delhpine Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy: Transcending the State*, 2015, Routledge, 78.

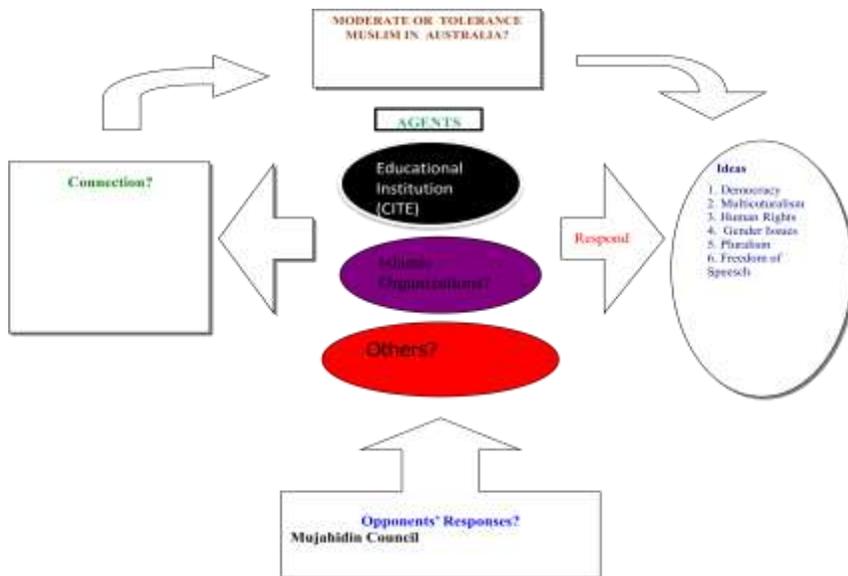
<sup>17</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, 2009, Bandung: Mizan. 32.

khususnya – budaya masyarakat Jawa Barat yang memiliki nilai *Silih Asah Silih Asih, Silih Asuh*.

Secara historis, sesungguhnya Islam moderat sudah eksis di kepulauan Nusantara sejak awal kedatangan Islam yang dibawa secara damai oleh para ulama di Nusantara ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberlangsungan Islam moderat tetap eksis di Indonesia, yaitu: secara internal, Islam moderat menjadi pilihan baik individu maupun organisasi Islam dalam menjalankan visi, misi, strategi dan program dakwah dan gerakannya; secara eksternal, adanya pengaruh para ulama dan intelektual muslim modernis yang berkembang di Timur Tengah mempengaruhi dunia Islam, disamping juga adanya perubahan politik secara global paska 11 September. Konteks historis, sosial, politik, dan budaya serta aspek-aspek yang melingkupi perkembangan Islam moderat baik di Indonesia maupun di Australia ini, akan menjadi kerangka berfikir penelitian ini.

**Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian**





## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pengalaman Islam dan konsep negara di Indonesia memiliki sejarahnya yang panjang, karena sebelum era kolonialisme, Indonesia sebagian besar merupakan kerajaan-kerajaan Islam. Pengaruh Islam sudah sangat kuat melekat dalam berbagai kebudayaan di bekas-bekas kerajaan Islam di Indonesia. Berbicara kebudayaan Indonesia sulit dipisahkan dengan pengaruh Islam. Dalam penelitian ini diskursus mengenai Islam dan konsep negara difokuskan sejak perdebatan konsep negara-bangsa pasca kemerdekaan. Dan kajian atau penelitian mengenai topic tersebut sudah banyak sekali. Namun ada beberapa penelitian yang agak relefan dengan penelitian ini, salah satunya adalah penelitian Bahtiar Effendy, "*Islam and the State in Indonesia*"<sup>18</sup> Hasil penelitian disertasinya di Institute of Southeast Asean Studies Singapore. Dalam penelitiannya, dia cukup lengkap mendiskripsikan perdebatan Islam dan konsep negara di Indonesia, diawali dengan mendeskripsikan problematika hubungan Islam dan negara yang tidak mudah, sehingga memunculkan antagonism dalam hubungan Islam dan Negara sekuler (demokrasi ). Bahtiar juga mendeskripsikan munculnya tiga pemikir Islam baru Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Amin Rais yang merepresentasikan tiga model pemikiran hubungan Islam dan Negara. Ide-ide tersebut menjadi khazanah intelektual Islam baik pada tataran Ideal maupun praktis, sampai lahirnya partai-partai Islam di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2003)

Tulisan yang lain, yaitu karya R.E. Elson, "Nationalism, Islam, 'secularism' and the state in contemporary Indonesia".<sup>19</sup> Dia menulis mengenai dampak politik nasional Indonesia. Khususnya, mengapa Islamisme mendapatkan daya tarik dan energi yg kecil. Hal ini menjelaskan ide-ide Islam politik ditinggalkan dalam kemunculannya di era Indonesia modern.

Tulisan Myengkyo Seo, dengan judul "*Defining 'religious' in Indonesia: toward neither an Islamic nor a secular state*",<sup>20</sup> yang meneliti manajemen negara berbasis agama dengan menfokuskan diri pada peraturan-peraturan selama Orde Baru. Kemudian, karya R. William Liddle, "*The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation*",<sup>21</sup> yang meneliti mengenai penggambaran politik dari peran Islam di era Indonesia kontemporer dengan menganalisa fenomena ICMI.

Di sisi lain, diskursus Islam, demokrasi dan multikulturalisme di Australia menampilkan wajah yang berbeda. Di satu sisi, komunitas muslim di Australia sebagaimana di negara eropa yang lain berposisi sebagai kelompok minoritas. Di sisi lain, dianggap sebagai komunitas etnik pendatang yang berbeda dengan budaya eropa pada umumnya.

Tulisan yang mendalam mengenai Islam di Australia adalah "*Islam in Australia, in Australia and the Arab world*" karya Shahram Akbarzadeh tahun 2009.<sup>22</sup> Dia menggambarkan gagasan tentang multikulturalisme sebagai ideologi nasional

---

<sup>19</sup> R.E. Elson, "Nationalism, Islam, 'secularism' and the state in contemporary Indonesia", *Australian Journal of International Affairs*, Volume 64, 2010 - Issue 3: Religious nationalism and nation-building in Asia.

<sup>20</sup> Myengkyo Seo, "Defining 'religious' in Indonesia: toward neither an Islamic nor a secular state", *Journal of Citizenship Studies*, Volume 16, 2012 - Issue 8: Secularism and Citizenship Beyond the North-Atlantic World.

<sup>21</sup> R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 55, No. 3 (Aug., 1996), pp. 613-634.

<sup>22</sup> Akbarzadeh, Shahram, *Islam in Australia, in Australia and the Arab world*, (I. B. Tauris, London, England, 2009)

telah menampakkan kontradiksinya, di satu sisi dipromosikan oleh negara, di sisi lain, lebih sebagai integrasi sosial pada yg lain. Kenyataannya, lebih sebagai promosi identitas etnik Anglo yang membutuhkan integrasi dari etnik minoritas ke dalam masyarakat yang lebih besar. Ditambah lagi, masalah kompleks terkait multikulturalisme itu sendiri adalah konsep yang terus diperdebatkan. Di UK, multikulturalisme di desain untuk melindungi kelompok-kelompok agama minoritas, meski kenyataan dalam praktiknya juga dianggap gagal. Dalam konteks UK, Tariq Modood berpendapat bahwa multikulturalisme seringkali gagal karena kenyataannya lebih sebagai '*mutual integration*' antara budaya mayoritas dan minoritas.

Konsep rasa memiliki, integrasi sosial dan kewarganegaraan bukanlah isu kelembagaan resmi. Namun lebih merupakan tertanam dalam hubungan psikologis dan emosional pada tanah air. Saied R. Ameli dan Arzu Merali berpendapat bahwa kewarganegaraan merupakan koneksi emosi terhadap negara, atau perasaan memiliki tanah air dan kewargaan masyarakat. Tanpa hubungan emosi tersebut kewarganegaraan akan steril.

Berbagai literatur menyatakan bahwa sikap Muslim untuk menjadi warganegara dibawah aturan sekuler dalam demokrasi liberal merupakan sebuah percampuran dan menyisakan perasaan sakit. Humayun Ansari, Tariq Modood, Saied R. Ameli dan Arzu Merali telah menemukan beragam pendapat di UK. Muslim Council of Britain (MCB), sebuah Lembaga Muslim Inggris yang anggotanya lebih dari 350 organisasi Islam dari seluruh UK dan kelompok Hizbut Tahrir menawarkan pandangan yang jelas berbeda di kalangan muslim UK.

MCB konsiten melawan terorisme dan mengajak Muslim di UK bekerja sama dengan otoritas negara memerangi

terorisme dan menegaskan isu-isunya mendukung keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. MCB berkomitmen sebagai warganegara yang terbuka dengan pernyataan, “ Kami Orang Inggris dengan warisan tradisi Islam”.

Kontras dengan Hizbut Tahrir, yang bersikap tanpa kompromi untuk mengakui kewarganegaraan di UK dan Australia. Menurut organisasi pinggir ini, mengakui kewarganegaraan adalah serupa dengan mengkhianati Islam, seperti menyerahkan kepasrahan diri terhadap kedaulatan Tuhan, oleh karena itu HT dan organisasi Muhajirun dan sejenisnya menolak kebijakan multikulturalisme sebagai kedok asimilasi dan menghilangkan identitas Islam.

Di Australia, Islamic Council of Bictoria (ICV) menegaskan diri untuk melakukan rekonsiliasi. ICV merupakan lembaga Islam yang paling enerjik menolak asumsi adanya kontradiksi antara kewarganegaraan Australia dengan kesalehan Islam. Mereka ingin dikau sebagai warga negara asli, juga sebagai muslim sejati.<sup>23</sup>

Tidak begitu banyak literature di Australia terkait topic ini, mungkin karena pertumbuhan komunitas Muslim Australia juga masih baru. Namun demikia ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, sebagai berikut: Anthony Moran, “*Multiculturalism as nation-building in Australia: Inclusive national identity and the embrace of diversity*”,<sup>24</sup> dan Andrew Jakubowicz, “*Political Islam and the Future of Australian*

---

<sup>23</sup> Akbarzadeh, Shahram, *Islam in Australia, in Australia and the Arab world*, (I. B. Tauris, London, England, 2009), pp.117-134.

<sup>24</sup> Anthony Moran, “Multiculturalism as nation-building in Australia: Inclusive national identity and the embrace of diversity”, *Ethnic and Racial Studies*, Volume 34, 2011 - Issue 12.

*Multiculturalism*"<sup>25</sup> yang bisa menjadi bahan bacaan dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, menurut hemat peneliti belum ada kajian mengenai "*Islam, Democracy and Tolerance within an Indonesian and Australian Context: the Response of Muslim Communities to the Multiculturalism as National Ideology*", apalagi yang berusaha membandingkan dua komunitas muslim di dua negara, di Indonesia sebagai kelompok Mayoritas dan di Australia sebagai kelompok minoritas.

---

<sup>25</sup> Andrew Jakubowicz, "Political Islam and the Future of Australian Multiculturalism" *National Identities Journal*, Volume 9, 2007 - Issue 3: 'National Identity and Diversity'

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan normative-historis, pendekatan normative dimaksudkan untuk memahami aspek doktrin dalam khazanah pemikiran Islam mengenai isu demokrasi, toleransi dan multikulturalisme dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud pendekatan historis yaitu pendekatan interdisipliner dalam ilmu-ilmu sosial yang dapat digunakan sebagai alat analisis, seperti ilmu politik dan sosio-antropologis. Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif, yaitu berusaha menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Para peneliti akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya selama 3 bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terkait topik penelitian, FGD bersama para ahli di UIN SGD Bandung dan FGD bersama para ahli di Centre for Islamic Thought & Education, University of South Australia, di Australia, serta wawancara dengan para informan yang diperlukan. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan pengolahan atau analisis data pada 1 bulan terakhir dari jangka waktu penelitian.

Penelitian dilakukan oleh tim, namun untuk efektivitas kerja maka masing-masing peneliti akan bertugas sesuai dengan bidang keahliannya.

### **B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data**

Lokasi Penelitian dilakukan di Wilayah Bandung Indonesia dan wilayah Adelaide Australia. Lebih Khusus lagi, wilayah Bandung dan sekitarnya dengan meneliti upaya-upaya

yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung serta lembaga pendukung lain di sekitarnya, sementara wilayah Adelaide dengan meneliti Centre for Islamic Thought & Education, University of South Australia, serta komunitas-komunitas pendukungnya.

Karena pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka data yang dicari adalah data kualitatif, namun ini tidak berarti mengabaikan data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif tetap diperlukan untuk melihat, misalnya, komposisi jumlah penganut, statistik perbandingan, dan lain-lain. Sedangkan data kualitatif terkait dengan pandangan, pemikiran, dan gagasan tentang Islam, demokrasi dan toleransi yang dikembangkan oleh dua lembaga tersebut dan program-program kegiatannya yang berhubungan dengan upaya membangun harmoni dan mempromosikan isu demokrasi dan multikulturalisme sebagai ideologi nasional.

Secara sederhana yang menjadi sumber data adalah para stake holder dan para ahli di UIN SGD Bandung dan Centre for Islamic Thought & Education, University of South Australia, program-program pengembangan akademik, program-program kegiatan yang telah dilakukan, kebijakan-kebijakan lembaga dan sumber-sumber kepustakaan lain seperti buku-buku, jurnal maupun dokumen-dokumen yang terkait. Akan tetapi, agar efektif maka pencarian data tersebut akan dilakukan secara *purposive sampling*, maksudnya sumber data atau informan akan dipilih sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan atau yang dianggap mengetahui sehingga dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data dari para stake holder dan para ahli di lembaga akan dilakukan dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD).

### C. Teknik dan Alat Pengumpul Data.

Agar efektif maka pencarian data tersebut akan dilakukan secara *purposive sampling*, maksudnya sumber data atau informan akan dipilih sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan atau yang dianggap mengetahui sehingga dapat memberi jawaban terhadap masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terkait topik penelitian, FGD bersama para ahli di UIN SGD Bandung dan FGD bersama para ahli di Centre for Islamic Thought & Education, University of South Australia, di Australia, serta wawancara dengan para informan yang diperlukan. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan pengolahan atau analisis data pada 1 bulan terakhir dari jangka waktu penelitian.

### D. Langkah-langkah Penelitian

- Pengumpulan data penelitian dilakukan 4 bulan, diawali dengan studi kepustakaan yang direncanakan dilakukan selama 1 setengah bulan pertama.
- Minggu ke 3 bulan ke 2 (sekitar Pertengahan September) kunjungan, wawancara, dan FGD bersama para ahli Islam Australia di *Centre for Islamic Thought and Education, University of South Australia* di Adelaide.
- Pada minggu ke 4 bulan ke 2 (akhir September) dipergunakan untuk *focus group discussion* di UIN SGD Bandung Indonesia.
- Minggu pertama bulan ke-3, dipergunakan.
- 2 minggu pertama bulan ke-3 dipergunakan untuk membuat laporan antara (*progress report*) dan melengkapi data penelitian yang dianggap kurang.

- Selanjutnya 2 minggu terakhir bulan ke-3 akan dipergunakan untuk melakukan *focus group discussion* lagi dan penyempurnaan analisis data.
- Bulan ke-4, dipergunakan untuk membuat laporan akhir dan penyempurnaan untuk pengiriman artikel jurnal internasional.
- Dengan mempertimbangkan masing-masing peneliti memiliki kepentingan keluarga maka pada setiap minggu kerja lapangan akan menggunakan 5 hari kerja dan menggunakan hari-hari akhir pekan (*weekend*) untuk pulang menemui keluarga.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Islam di Indonesia dan Australia**

Indonesia adalah bangsa yang multikultur, dalam konteks kehidupan berbangsa dan berbudaya telah menganut multikulturalisme sebagai ideologi nasional. Dengan simbol yang telah disepakati bersama, yaitu Bhineka Tunggal Ika, bangsa Indonesia memiliki komitmen politik kebudayaan untuk mengakui berbagai keragaman budaya, baik suku, etnik, agama, ras dan gender dalam satu tujuan bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden. Sementara dalam kehidupan bernegara menganut sistem demokrasi berdasarkan azas Pancasila, dimana nilai-nilai keagamaan menjadi azas utama dalam kehidupan bernegara yang tercermin dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di Indonesia agama memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Peranan agama sangat berpengaruh secara kolektif dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya.

Salah satu agama yang cukup berpengaruh adalah Islam. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, dan memiliki pengaruh paling dominan secara sosial, politik dan budaya. Menurut hasil sensus tahun 2010, dari 237.641.326 penduduk Indonesia, sejumlah 207.176.162 (87,18%) adalah pemeluk Islam; sejumlah 16.528.513 (6,96%) pemeluk Protestan; sejumlah 6907873 (2,9%) pemeluk Katolik; sejumlah 4.012.116 (1,69%) pemeluk Hindu; sejumlah 1703254 (0,72%) pemeluk Buddha; sejumlah 117.091 (0,05%) pemeluk Kong Hu Cu; sejumlah 299.617 (0,13%) pemeluk agama lainnya; sejumlah

139582 (0,06%) tidak terjawab; dan sejumlah 757.118 (0,32%) tidak ditanyakan.<sup>26</sup>

Sedangkan Australia, adalah bangsa yang multikultur, dimana dalam konteks kehidupan berbangsa dan politik kebudayaannya sama-sama menganut multikulturalisme sebagai ideologi nasional, seperti halnya di Indonesia. Negara Australia merupakan negara yang berbentuk persemaikmuran dengan monarki konstitusional (the Commonwealth of Australia), yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal mewakili Ratu Inggris. Sedangkan, dalam konteks pemerintahannya, pemerintahan Australia dipimpin oleh Perdana Menteri dengan sistem parlemen. Berbeda dengan di Indonesia, dalam kehidupan bernegara menganut sistem demokrasi liberal, yaitu sistem demokrasi yang tidak menganut atau bersumber pada nilai-nilai agama. agama tidak terlalu berperan dalam kebijakan politik, ekonomi dan budaya. Tidak ada agama yang diakui secara resmi oleh negara, warga negara memiliki kebebasan untuk menganut agama apapun yang mereka pilih termasuk bebas untuk tidak menganut agama apapun.

Di Australia, semua agama diberi kebebasan untuk hidup selama mereka mematuhi hukum, dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Australia. Meski agama tidak memiliki peranan signifikan dalam kebijakan politik ekonomi Australia, namun di Australia juga dihadapkan pada kenyataan mengenai problem mayoritas dan minoritas, dimana keberpihakan kebijakan politik ekonomi Australia juga lebih berpihak pada masyarakat mayoritas yang beretnik Anglo dan beragama Kristen. Secara umum, data sensus penduduk tahun 2006 menunjukkan bahwa agama mayoritas di Australia adalah

---

<sup>26</sup> *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Lihat <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id>, diakses 25 April 2017.

pemeluk agama Kristen. Prosentase pemeluk agama dari seluruh jumlah penduduk di Australia adalah sebagai berikut: Katolik (25,8%), Anglikan (18,7%), Gereja Pemersatu (5,7%), Budha (2,1%), Islam (1,7%) dan Hindu (0,7%).<sup>27</sup>

Berdasarkan data tersebut, Islam di Australia adalah agama minoritas yang dipeluk oleh sekitar 340.000 jiwa (1,7%) dari keseluruhan jumlah penduduk. Muslim di Australia juga sangat beragam, dari data tersebut tercatat 128.904 (40%) lahir di Australia dan 60% sisanya lahir dari luar Australia (penduduk migran). Kebanyakan dari mereka adalah migran dari Libanon dan Turki, sedangkan lainnya adalah 15.965 dari Afganistan, 13.821 dari Pakistan, 13.361 dari Banglades, 10.039 dari Irak, kemudian 8.656 dari Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam tiga dekade terakhir memang banyak muslim melalui program pengungsi dan kemanusiaan telah bermigrasi ke Australia dari negara-negara Afrika yang mayoritas muslim, seperti Somalia dan Sudan. Kebanyakan muslim di Australia hidup di Sydney dan Melbourne. Mereka telah banyak membangun masjid dan sekolah, serta telah memberikan sumbangsih nilai dan warna budaya dalam kehidupan multikultural di Australia.<sup>29</sup> Namun, sebagai kelompok minoritas, Muslim di Australia tidak memiliki saluran politiknya baik di parlemen maupun legislatif. Sehingga, secara politik,

---

<sup>27</sup> Kedutaan Besar Australia Indonesia, Kebebasan Agama di Australia, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan\\_beragama.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html), diakses 28 April 2017.

<sup>28</sup> Kedutaan Besar Australia Indonesia, Kebebasan Beragama di Australia, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan\\_beragama.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html)

<sup>29</sup> Kedutaan Besar Australia Indonesia, Muslim di Australia, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/Muslim di Australia.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/Muslim%20di%20Australia.html), diakses 28 April 2017

aspirasi Muslim di Australia tidak tersalurkan secara baik karena hanya menjadi pemilih saja.<sup>30</sup>

Baik di Indonesia maupun di Australia, konsep multikulturalisme sebagai ideologi nasional merupakan sebuah kebutuhan, melihat realitas masyarakatnya yang beranekaragam dan majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok suku, agama, ras dan golongan (*ethnic and cultural groups*) bisa hidup saling berdampingan dengan damai dan harmonis. Dalam konteks inilah, peran negara dan berbagai kelompok masyarakat di dalamnya agar berperan serta untuk menjadikan ideologi multikulturalisme ini sebagai kekuatan membangun bangsa dan negara. Namun demikian, kenyataan kadang berbeda dengan konsep multikulturalisme sebagai ideologi nasional yang diangankan. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga-lembaga yang mempromosikan Islam moderat, toleransi dan multikulturalisme di kedua negara tersebut.

## **B. Agen-agen Islam Moderat di Indonesia**

### **1. Institusi Pendidikan (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)**

Isu Islam Moderat menyeruak ke muka seiring dengan munculnya gerakan-gerakan terorisme dan radikalisme atas nama agama. Tulisan ini ingin menyoroti kontribusi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia –khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKAI) di Indonesia. Lebih khusus lagi, tulisan ini ingin menyoroti peran Fakultas Ushuluddin UIN Bandung dalam mensosialisasikan Islam Moderat.

---

<sup>30</sup> Imam Pratio, Sejarah Islam di Australia, 8 april 2011, <https://islam33.wordpress.com/2011/04/08/sejarah-islam-di-australia/>, Diakses 26 April 2017.

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu pada pasal 5, disebutkan 4 (empat) tujuan pendidikan tinggi, di antaranya berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kita bisa memahami lebih luas bahwa ungkapan “berbudaya untuk kepentingan bangsa” dengan pengertian bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menghasilkan lulusan yang memiliki budaya baik, termasuk budaya dalam menghargai keragaman. Dari sinilah dapat dipahami, bahwa radikalisme dan terorisme tidak dapat diterima dalam konteks lulusan Perguruan Tinggi. Itu artinya, mensosialisasikan dan menerapkan Islam Moderat pada dasarnya merupakan implementasi dari undang-undang di atas.

Kementerian Agama yang juga menaungi perguruan tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)/ Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKAIS) dituntut untuk mensosialisasikan dan menjabarkan konsep Islam Moderat dalam instrumen-instrumen pendidikan. Sadar akan hal ini, dalam beberapa kesempatan Menteri Agama Republik Indonesia menyerukan Islam moderat sebagai model ekspresi keagamaan, terutama kaitannya dengan keberagaman dan kebinekaan. Bahkan seruan tersebut pernah disampaikannya pada pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-16 dan Halaqah Ulama ASEAN pada tahun 2016. Seruan ini memiliki relevansi ketika ada sementara orang membagi tipologi ekspresi keagamaan menjadi Islam Garis Keras dan Islam Moderat, dan lebih relevan lagi dengan fenomena kemunculan gerakan ekstremisme atas nama agama.

Dalam beberapa kesempatan kunjungan ke beberapa Perguruan Tinggi, Menteri Agama selalu menyerukan promosi Islam Moderat. Misalnya, hal itu ia sampaikan ketika menyampaikan kuliah umum bertema "Peran PTKIN dalam Merawat Kebhinekaan dan Memperkokoh Toleransi" yang diselenggarakan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), pada tanggal 23 Pebruari 2017. Di antara pesan yang disampaikannya, "PTKIN mampu untuk menjaga, merawat kebhinekaan dan memperkokoh toleransi. Sehingga kita harus arif dan bijaksana serta santun dalam melihat keberagaman. Akhirnya kita tidak mudah menyalah-nyalahkan atau membid'ah-bid'ahkan orang yang tidak sepaham dengan kita." (<http://kampus.iainbukittinggi.ac.id>).

Jika Menteri Agama berharap besar PTKIN/S berperan besar dalam peneguhan Islam Moderat, maka itu dianggap wajar mengingat keberadaannya yang cukup signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari segi kuantitas, PTKIN terdiri dari 11 Universitas Islam Negeri (UIN), 11 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan 18 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Adapun PTKIS terdiri dari 52 Institut Agama Islam (IAI), 546 Sekolah Tinggi (ST), dan 96 Universitas. (<http://diktis.kemenag.go.id>). Jumlah mahasiswa yang tercatat di Education Management Information System Pendidikan Islam Kemenag R.I. (EMIS PENDIS) berjumlah 809,349 mahasiswa Strata-1. Adapun jumlah tenaga pengajarnya adalah 28,481. Ini adalah jumlah potensial sebagai instrumen penguatan Islam Moderat. (<https://emispendis.kemenag.go.id>.)

Dibentuknya Prodi Studi Agama-Agama (sebelumnya Perbandingan Agama) di Fakultas Ushuluddin di beberapa PTKIN sebenarnya—salah satunya—bertujuan mensosialisasikan Islam Moderat. Prodi ini mempunyai tujuan utama

memperkenalkan keragaman agama di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan bijak dalam menghadapi keragaman tersebut. Lebih jauh dari itu, mahasiswa dapat menjadikan keragaman tersebut menjadi perekat dalam kesatuan. Sebagaimana diketahui, radikalisasi atas nama agama sebagian besar terjadi pada isu-isu atau konflik-konflik agama, khususnya respon terhadap pemeluk agama lain.

Atas apa yang telah dilakukan oleh PTKIN/PTKIS dalam membingkai Islam Moderat, maka sewajarnya jika Perguruan Tinggi tersebut dituntut menjadi pelopor dalam melahirkan konsep “Islam Moderat” yang paripurna sekaligus mempersiapkan duta-duta Islam moderat yang menjadi para lulusannya.

## **2. Deklarasi Islam Moderat**

Tekad Perguruan Tinggi untuk melawan radikalisme, atau ekstremisme, atau terorisme ditandai dengan pengucapan deklarasi. Setidaknya ada empat peristiwa deklarasi kampus sebagai gong perang terhadap radikalisme, atau ekstremisme, atau terorisme. Pertama, Deklarasi Aceh 26 April 2017 yang disepakati oleh 55 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia. Deklarasi berisi penolakan terhadap segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI. Kedua, Deklarasi Anti Radikalisme 6 Juli 2017 di Surabaya yang diikrarkan sejumlah Perguruan Tinggi. Ketiga, Deklarasi Anti Radikalisme 14 Juli 2017 di Bandung yang disepakati 44 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Barat. Isinya kurang lebih sama, yaitu mencegah menjalarnya paham radikal di kampus. Keempat, Deklarasi Islam Moderat Bandung 6 Agustus 2017 yang disepakati oleh 23 Dekan Fakultas Ushuluddin PTKIN se-Indonesia. Deklarasi ini

lebih spesifik berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Islam Moderat di perguruan tinggi.

Tidak bisa dipungkiri deklarasi tersebut langsung maupun tidak langsung merupakan respon terhadap berbagai gerakan radikalisme atau terorisme atau ekstremisme yang belakangan ini terjadi. Deklarasi itu juga sekaligus merupakan komitmen agar paham radikal tidak masuk ke dalam kampus, sekaligus komitmen kampus untuk menjadikan *Empat Pilar Kebangsaan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara*. Komitmen membentuk mahasiswa yang tidak radikal sekaligus berjiwa nasionalis bisa saja merupakan implementasi dari tujuan pendidikan tinggi itu sendiri.

Potensi kemunculan paham radikalisme atau terorisme di kampus memang harus diantisipasi dengan serius, meskipun tidak perlu berlebihan juga mencurigai kampus. Potensi tersebut muncul seiring dengan terbukanya kampus terhadap berbagai kajian, kebebasan dalam mengkaji dan berpikir, dan bahkan ditambah dengan gencarnya teknologi media yang masuk ke dalamnya. Potensi itu semakin menguat tatkala ada anggota masyarakat kampus yang bergabung dengan salah satu paham/aliran yang berideologikan radikal. Harus diakui pula bahwa penerimaan mahasiswa baru tidak disertai dengan *screening* untuk mendeteksi paham radikalisme yang melekat pada dirinya atau bawaan dari sebelumnya, sehingga boleh jadi menular kepada para mahasiswa lainnya. Maka, dalam konteks seperti ini, peristiwa deklarasi di atas tidak saja wajar, tetapi bahkan seharusnya dilakukan.

Deklarasi telah dibacakan dan disepakati, persoalannya sekarang adalah bagaimana isi deklarasi tersebut tercerminkan dalam semua instrumen kampus, terutama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Anti Radikalisme di Bandung. Lebih penting lagi, bagaimana

deklarasi tersebut diterjemahkan dalam bentuk kurikulum sehingga lulusan yang dihasilkan mencerminkan isi deklarasi tersebut, sebagaimana salah satu isi Deklarasi Aceh dan Deklarasi Islam Moderat di Bandung.

### **Deklarasi Aceh**

1. Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
2. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.
3. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil `alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan dan realitas budaya dan bangsa.
4. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagaman, serta terorisme di seluruh PTKIN.
5. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

### **Deklarasi Bandung I**

Kami Forum Dekan Fakultas Ushuluddin PTKIN dengan ini menyatakan:

1. Bertekad menjadikan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

2. Bertekad menghidupkan nilai-nilai ajaran Islam Moderat dan rahmatan lil-alamin di tengah kemajemukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bertekad melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam Moderat dan rahmatan lil-alamin dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Bertekad mencetak lulusan yang komitmen dengan nilai-nilai ajaran Islam Moderat dan *rahmatan lil-alamin*.

### **Deklarasi Bandung II**

1. Kami berpegang teguh pada posisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan Pandangan hidup bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan semangat Bineka Tunggal Ika;
2. Kami bertekad mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, demokratis, jujur, berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai, etika akademik, hak asasi manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan Nusantara;
3. Kami menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan / atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme, dan / atau organisasi kemasyarakatan / organisasi politik yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan;
4. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran paham dan / atau gerakan radikalisme, terorisme dan / atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bukan hanya sekedar mencegah paham radikalisme dan terorisme, sejatinya kampus juga melahirkan produk-produk pemikiran yang moderat, santun, dan tentu saja berwawasan kebangsaan. Hal itu sangat memungkinkan untuk terwujud karena riset dan produksi karya ilmiah merupakan tugas yang melekat baik pada dosen maupun mahasiswa. Lebih dari itu, formula sikap keagamaan dan kemasyarakatan yang moderat, santun, dan berwawasan kebangsaan pun harus segera dirumuskan oleh kampus dalam bentuk-bentuk modul. Dalam konteks Islam, jargon Islam Moderat atau Islam *rahmatan lil-alamin* ada sebuah *grand theory* atau sebuah nilai luhur yang penjabaran atau implementasinya memerlukan kajian-kajian akademik yang diantaranya memungkinkan dilakukan masyarakat kampus.

Menghasilkan duta-duta damai, moderat, dan santun dalam mengekspresikan sikap keagamaan merupakan tugas yang tidak dapat dipisahkan dari proyek deradikalisasi kampus. Di sinilah perlunya perumusan profil lulusan yang memiliki karakter-karakter tersebut. Deradikalisasi kampus harus disertai dengan pengupayaan menjadikan lulusan perguruan tinggi sebagai duta-duta yang menanamkan nilai-nilai kedamaian, kemoderasian, dan kesantunan, terutama di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Dengan demikian, deradikalisasi kampus sejatinya berarti deradikalisasi masyarakat yang lebih luas.

### **3. Kurikulum Islam Moderat**

Meskipun tidak ada formulasi tegas, tetapi gambaran umum tentang Islam moderat adalah pemahaman dan perilaku keberagaman yang melahirkan sikap toleransi dalam menghadapi keragaman, terutama menyangkut isu pluralisme agama, sehingga mewujudkan nilai-nilai damai dalam Islam.

Sikap ini sangat diperlukan dalam konteks merawat kebineka-tunggal-ekaan Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Jika itu yang dimaksud, maka moderasi Islam sesungguhnya *built-in* dengan inti ajaran Islam itu sendiri. Banyak rujukan naqliah yang dapat dihadirkan untuk mendukung kesimpulan ini. Bahkan, moderasi Islam ini seiring dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan –khususnya– budaya masyarakat Jawa Barat yang memiliki nilai *Silih Asah Silih Asih, Silih Asuh*.

Pertanyaan mendasarnya, sejauh mana seruan Islam moderat dijabarkan dalam konteks penanaman nilai kepada peserta didik, yakni dalam instrumen proses pendidikan di Indonesia di setiap jenjangnya? Islam moderat adalah sebuah hasil dari proses pendidikan yang tentunya tidak muncul secara tiba-tiba dari kesadaran umat beragama. Tanpa diterjemahkan ke dalam instrumen-instrumen tersebut, dikhawatirkan seruan tersebut tak ubahnya seperti jargon yang prakteknya sulit ditemukan.

Dalam tataran teoritisnya, Islam moderat adalah sebuah rumusan yang memiliki spektrum luas dan kompleks. Tidak saja menysasar aspek keyakinan/aqidah, tetapi juga menysasar aspek pemahaman terhadap doktrin-doktrin syariah itu sendiri. Bahkan, dalam konteks kebangsaan, Islam moderat menysasar isu keragaman, masyarakat sipil, dan lainnya. Jadi, kontruksi Islam moderat sebagai model ekspresi keberagaman hanya bisa diwujudkan jika menjadi instrumen penting dalam proses pendidikan di Indonesia.

Jika mau lihat bagaimana proses pendidikan Islam moderat dijalankan dengan baik, kita bisa melihat praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Madinah adalah sebuah realitas masyarakat sipil (civil society)dimana Islam moderat dipraktekkan. Piagam Madinah adalah modul berisikan nilai-nilai moderasi Islam. Ekspresi

keberagamaan muslimin di Madinah yang moderat adalah sebuah proses panjang penanaman pendidikan oleh Nabi yang dimulai dari pembangunan dasar idiologi di Mekah sampai penanaman nilai-nilai kehidupan sosial di Madinah. Keragaman sistem sosialnya membuat Madinah saat itu menjadi kota percontohan praktek Islam moderat. Masyarakat Madani yang sering menjadi gambaran masyarakat ideal pada dasarnya merupakan cerminan masyarakat sipil kota Madinah yang mana Nabi sebagai perekayasa sosialnya.

Salah satu instrumen dalam mensukseskan pendidikan Islam moderat adalah penyusunan kurikulumnya itu sendiri. Kurikulum Anti Radikalisme atau—lebih spesifik lagi— Kurikulum Agama Moderat harus segera dirumuskan. Tentu tidak mesti dalam bentuk nama-nama mata kuliah tertentu, tetapi bisa jadi dalam bentuk pengorientasian atau pengarus-utamaan salah satu tujuan pembelajaran itu sendiri. Di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) upaya ke arah itu sudah dilakukan semenjak lama, misalnya dengan menyajikan beberapa mata kuliah yang memperlihatkan keluasan ajaran Islam dan keanekaragaman dalam memahami ajarannya. Tujuan utamanya adalah memupuk keluasan pandangan mahasiswa dalam memahami Islam dan kedewasaan dalam melihat keragaman. Di beberapa fakultasnya bahkan disajikan Mata Kuliah Perbandingan Agama (Studi Agama-Agama) untuk membuka cakrawala mahasiswa tentang keragaman agama sekaligus mendewasakan sikap mereka menghadapi keragaman tersebut. Mata Kuliah Resolusi Konflik disajikan agar mahasiswa terlatih menyelesaikan konflik.

Formulasi kurikulum yang dimaksud tentu saja harus melibatkan berbagai pihak dan bersinergi dengan antar lembaga, termasuk di dalamnya para pemangku kepentingan. Dalam kontek ini, perlu disambut baik kesepakatan antara

Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pertahanan menjalin sinergi dalam program deradikalisasi di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Pertemuan tiga pihak ini menghasilkan sejumlah inisiasi sinergi, antara lain penguatan Mahad Al-Jamiah dengan mengoptimalkan fungsi asrama mahasiswa pada PTU Negeri. Mahad Al-Jamiah ini akan mengembangkan sejumlah kajian keagamaan, utamanya berbasis kitab, sehingga mahasiswa memiliki kualitas keagamaan yang baik ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)). Kebijakan konkret dari kesepahaman di atas tentu saja sangat dinanti-nantikan.

Islam moderat sejatinya adalah ajaran Islam itu sendiri karena pada dasarnya Islam itu memang ajaran yang moderat. Dari sini bisa dilihat bahwa pada dasarnya materi yang diajarkan dalam bentuk mata kuliah di PTKIN (dan saya kita juga di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta/PTKIS) adalah Islam moderat. Di sini tidak ada keraguan. Problemnnya adalah bagaimana konsep Islam Moderat ini dijadikan semacam *manual book* atau *operational guidance* dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, atau dalam konteks kebangsaan Indonesia. Sebab, Islam Moderat sudah seharusnya menjadi paradigma hidup umat Islam, tidak saja menjadi bagian ajaran yang diyakininya.

Itu sebabnya, membingkai Islam Moderat dalam konteks kurikulum Perguruan Tinggi Islam memang memerlukan kajian akademik secara mendalam. Sampai hari ini, upaya ke arah itu sudah dilakukan oleh Perguruan Tinggi Islam. Misalnya, di Fakultas Ushuluddin (sebagai fakultas yang mengkaji pokok-pokok keilmuan Islam) diajarkan beberapa Mata Kuliah yang membentuk pemahaman bahwa dimensi Islam itu luas, tidak hanya sekedar ibadah ritual. Di sini para mahasiswa dihantarkan pula kepada keragaman/kebinekaan dalam

memahami Islam, dengan merujuk realita kemunculan beberapa aliran (teologi, tafsir, fiqih, politik, filsafat, dan lain-lain) dalam memahami Islam. Tidak cukup sampai di situ, mahasiswa seolah diajak masuk ke dalam pusaran perdebatan dalam memahami Islam, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa keragaman itu alami dan wajar bahkan mendatangkan rahmat.

Ada beberapa acuan penting yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kurikulum Islam moderat.

*Pertama, materi pengajaran harus menysasar semua dimensi ajaran Islam. Moderasi Islam berada dalam semua ajarannya dan saling terkait. Tidak saja dalam dimensi aqidah/idiologi-tauhidi, tetapi juga dalam dimensi implementasi aqidah tersebut, termasuk di dalamnya moderasi ajaran tasawuf, fiqih, bahkan ajaran politik. Ummatan washatan/washatiyah (sigar tengah) adalah terma yang diambil Al-Qur'an yang memberikan gambaran moderasi dalam segenap ajaran Islam. Penyusunan materi yang komprehensif ini harus disertai dengan strategi pembelajaran yang tepat dan menyentuh semua level pendidikan, baik di lembaga formal maupun informal. Sikap moderat dan toleran sejatinya bahkan diajarkan kepada seseorang semenjak usia dininya.*

*Kedua, perlu diberi penegasan tentang di ruang-ruang publik mana saja Islam moderat memberikan tempat bagi sikap toleran. Hal ini penting dicatat agar kurikulum yang dirumuskan tidak menghasilkan lulusan yang lembek atau tidak berdaya menghadapi berbagai deviasi. Islam tidak saja mengajarkan ruhamah (kelembutan, kesantunan, dan toleransi), tetapi juga asyidda' (ketegasan terhadap deviasi). Islam moderat sejatinya tidak menafikan keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip yang diajarkan Islam itu sendiri.*

Yang terpenting dari itu semua, para pengajarnya harus benar-benar memahami rumusan Islam moderat itu sendiri. Di sinilah pentingnya pengadaan Training of Trainer (TOT) bagi mereka. Dalam konteks Jawa Barat, pemberdayaan para Penyuluh Agama Islam (PAI), misalnya, sebagai agen

penyebaran ajaran Islam moderat tidak bisa dianggap enteng. Mereka sesungguhnya yang seharusnya menjadi *agent of moderate Islam* di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja kita tidak bisa menafikan potensi besar lainnya berupa jumlah para pengajar di lembaga-lembaga formal dan informal. Peran penting lainnya yang harus dioptimalkan adalah yang dipegang oleh Perguruan-Perguruan Tinggi Islam. Lembaga pendidikan yang terakhir ini bisa dijadikan sebagai *think tank* tentang rumusan kurikulum Islam moderat itu sendiri melalui penelitian-penelitian yang berkualitas. Dan yang lebih penting dari itu semuanya adalah regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri dalam mensukseskan pengajaran Islam moderat.

#### **4. Peran Kampus: Kasus Fakultas Ushuluddin UIN Bandung**

Provinsi Jawa Barat, tempat di mana Fakultas Ushuluddin berada, merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki angka prosentasi paling tinggi berkaitan dengan kekerasan atas nama agama. Di tanah Pasundan, dari berbagai peristiwa terjadinya radikalisme di Jawa Barat, banyak pelaku teroris berasal dari Jawa Barat. Terakhir, teror bom di mesjid di lingkungan Mapolresta Cirebon. Data tadi diperkuat laporan toleransi dan intoleransi 2010 yang dikeluarkan Moderate Muslim Society (MMS) yang menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam aksi intoleransi. Hasil laporan toleransi dan intoleransi tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Moderate Muslim Society (MMS) menunjukkan Jawa Barat menempati urutan tertinggi sebagai wilayah (Bekasi, Bogor, Garut, dan Kuningan) tertinggi dalam aksi intoleransi. Sementara, data hasil penelusuran The Wahid Institute selama 2011, dari 49 kasus, pelanggaran terbesar terhadap kebebasan beragama tertinggi

terjadi di Jawa Barat, yakni 55 kasus (setara 58%). Selanjutnya, Provinsi Banten dengan sembilan kasus (10%), dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lima kasus). Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan, masing-masing empat kasus.

Atas dasar realita di atas, Fakultas Ushuluddin memandang perlu mengambil posisi penting dalam mensosialisasikan dan mewujudkan Islam Moderat dan Islam Damai di Jawa Barat. Perhatian besar Fakultas ini terhadap isu Islam Moderat dan Islam Damai dicerminkan dalam misinya sendiri.

### **Misi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang ilmu-ilmu keushuluddinan berbasis Islam damai sebagai rahmat bagi semesta alam.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu-ilmu keushuluddinan yang memiliki tingkat relevansi dengan perubahan dan perkembangan sosial-keagamaan di masyarakat.
- c. Menginformasikan produk-produk Tridarma kepada masyarakat seluas-luasnya dengan prinsip mensosialisasikan Islam damai sebagai rahmat bagi semesta alam.

Sebagai tindak lanjut dari perhatian di atas, Fakultas Ushuluddin UIN Bandung menjadi tuan rumah pertemuan para dekan Fakultas Ushuluddin se-PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) 6-8 Agustus 2017 di Bandung. Pertemuan ini di antaranya membincang perlunya konsep "Islam Moderat" dibingkai dalam kurikulum di Perguruan Tinggi. Pembingkai ini bertujuan agar Islam Moderat jelas secara konseptual dan jelas secara operasional, sehingga bukan hanya sekedar jargon. Bukan itu saja, pembingkai

bertujuan agar konsep tersebut menjadi kesepahaman bersama seluruh masyarakat kampus, mulai dari dosen sampai mahasiswanya.

Pertemuan para dekan Fakultas Ushuluddin se-PTKIN di atas sejatinya (mudah-mudahan) pula melahirkan kesepahaman dan kesepakatan dalam bentuk Deklarasi Islam Moderat. Ini tentunya sekaligus menjadi kesiapan fakultas tersebut menjadi lokomotif Islam Moderat di Perguruan Tinggi Islam. Ada beberapa pertimbangan kenapa Fakultas Ushuluddin seharusnya menjadi lokomotif.

*Pertama*, Fakultas Ushuluddin merupakan fakultas yang membina atau mempelajari dan mengembangkan dasar-dasar agama (*ushuluddin*) Islam dalam teks dan konteks. Itu sebabnya dalam paradigma keilmuan, Ushuluddin—sebagai ilmu—menjadi ilmu murni. Itu sebabnya pula, ia menjadi induk ilmu keislaman (*mother of Islamic science*). Di sinilah peran penting Fakultas ini dalam membingkai konsep Islam Moderat.

*Kedua*, di Fakultas ini dikaji materi-materi yang berkaitan dengan batang tubuh Islam, seperti Studi al-Qur'an, Studi Hadits, Studi Tasawuf, Studi Aqidah/Teologi. Inilah materi-materi yang langsung membentuk paradigma hidup para mahasiswa, atau yang membentuk pemahaman mahasiswa terhadap Islam. Pembingkai dan konstruksi Islam Moderat dimulai dengan studi-studi di atas. Di Fakultas ini (khususnya Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir) Al-Qur'an dikaji tidak saja sebatas pemahaman, tetapi juga dikaji dalam konteks pergulatan pemikiran mufasir, sehingga ditemukan wisdom kekayaan khazanah penafsiran Al-Qur'an.

*Ketiga*, di Fakultas ini ada Prodi Studi Agama-Agama. Prodi ini—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—mempunyai tujuan utama memperkenalkan keragaman agama di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan bijak

dalam menghadapi keragaman tersebut. Lebih jauh dari itu, mahasiswa dapat menjadikan keragaman tersebut menjadi perekat dalam kesatuan. Sebagaimana diketahui, radikalisasi atas nama agama sebagian besar terjadi pada isu-isu atau konflik-konflik agama, khususnya respon terhadap pemeluk agama lain.

Peran penting Fakultas Ushuluddin sebagai lokomotif Islam Moderat tentu saja akan berfungsi secara maksimal jika mendapatkan afirmasi dari berbagai pihak, baik dari pihak internal Perguruan Tinggi maupun pihak eksternal/ *stakeholder* terutama pemerintah. Tugas Fakultas ini melahirkan produk, sementara pemakai produk itu sendiri adalah para *stakeholder*. Mungkin di sinilah perlunya sinergitas Perguruan Tinggi Islam dengan berbagai instansi/lembaga yang berkaitan erat dengan upaya penciptaan harmonisasi kehidupan keberagaman di Indonesia.

Beberapa aksi nyata yang dilakukan Fakultas Ushuluddin dalam mensosialisasikan Islam Moderat adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan beberapa mata kuliah yang berujung pada Islam Moderat. Di beberapa Fakultas Ushuluddin, di samping diajarkan keluasan Islam dan keragaman tersebut, bahkan diajarkan pula bagaimana para mahasiswa mengelola konflik yang terjadi di masyarakat (Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik). Tentu tujuan agar mahasiswa tidak alergi dalam menghadapi perbedaan bahkan lebih jauh dari itu ia terbiasa mengelola dan memberi solusi dalam mengatasi konflik.
2. Pengarusutamaan Islam Moderat dan Islam Nusantara sebagai Tema Penelitian. Tema-tema penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus merujuk kepada tema besar ini. Produk-produk penelitian, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa, tentang

- keberagamaan di Indonesia, dan lebih khusus lagi bagaimana menerjemahkan ajaran Islam menjadi perilaku keberagamaan yang santun, merupakan ikhtiar lainnya yang dilakukan untuk membingkai konsep Islam Moderat.
3. Mengarahkan Pengabdian Masyarakat ke desa-desa binaan, terutama di desa-desa yang bersinggungan dengan komunitas non-muslim (Misalnya Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat)
  4. Bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) untuk mensinergikan sosialisasi Islam Moderat di tengah-tengah masyarakat.
  5. Bekerjasama dengan forum-forum yang fokus pada isu-isu toleransi dan kedamaian (seperti dengan Forum Komunikasi Umat Beragama/FKUB).

## **5. Organisasi Massa (NU, Muhammadiyah Bandung)**

Islam hadir menciptakan harmoni dalam sikap membangun toleransi positif bagi semua kelompok agama dan aliran kepercayaan, hal tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Islam hadir membawa misi sebagai agama yang berimbang dalam mensikapi teks, *tawazun* antara eksklusif dan inklusif, tidak mengkultuskan organisasi, seimbang antara universalitas dan nilai loka, proporsional dalam penghormatan dan penghalalan, terbuka bagi peradaban namun perhatian terhadap jati diri, menerima pemikiran luar selama tidak melanggar *syariat* dan berdiri antara liberalisme mutlak dan kejumudan mutlak.

Syafi'i Ma'arif, dengan "ber-Agama Islam dalam Bingkai Keindonesiaan".<sup>31</sup> Penyebaran Islam di Indonesia identik dengan kedamaian, tidak memaksa pemeluk agama lain untuk masuk islam dan menghargai budaya, bahkan mengakomodasikannya kedalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. Semua itu dilakukan oleh para ulama Islam Indonesia, karena sikap toleran seorang ulama, maka banyak masyarakat yang simpatik untuk masuk agama Islam. Maka terlihatlah karakter asli Islam Indonesia yakni "Islam Moderat", disebut moderat, karena lebih menggunakan pendekatan pendidikan dan transformasi budaya.

Moderat diartikan sebagai sikap atau pandangan yang selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.<sup>32</sup> Lain halnya seorang Fazlur Rahman mengistilahkan Islam moderat dengan Islam neo-modernis. Neo-modernis yang dimaksud oleh Rahman yakni gambaran Islam di Indonesia atas respon terhadap modernisasi Islam, terdapat dua kelompok Islam Indonesia pertama, kelompok yang menolak atas modernisasi Islam dan setia terhadap ke tradisionalannya. Kedua kelompok yang menelan mentah-mentah arus Islam modern. Maka disini sebagai Islam yang neo-modernis memiliki tugas bagaimana kaum muslim mampu menghadapi tantangan modernisasi Islam tetapi tetap berpijak terhadap ketradisionalannya atau teguh terhadap keontetikan Islam Indonesia.<sup>33</sup> Nasaruddin Umar, mengemukakan beberapa poin penting yang berkenaan dengan Islam moderat.

---

<sup>31</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, 2009, Bandung: Mizan. 32.

<sup>32</sup> KBBI. 589.

<sup>33</sup> Hilaly Basya, *Menelusuri Artikulasi Islam Moderat*,

1. Islam moderat tidak identik dengan Islam liberal, Islam moderat mengedepankan sikap toleran segala aspek kehidupan mencakup agama, sosial, budaya, dan lainnya.
2. Memiliki pandangan yang modern sebagai agama Islam yang moderat dan pro terhadap jargon-jargon sekuler
3. Bukan setengah muslim yang sinkretis, melainkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* tidak menjadikan agama Islam sebagai agama yang digelari *Islamifobia*.
4. Kemoderat Islam tidak bisa di ukur dari segi penampilan saja, seperti tidak berjenggot, berjubah, dan atribut ketimuran lainnya, moderasi lebih banyak ditentukan oleh pikiran dan sikap seseorang terhadap agamanya.
5. Seseorang memahami ajaran Islam secara mendalam dan holistik, maka dengan sendirinya mereka akan bersikap moderat.
6. Islam moderat, merupakan jalan tengah, tunduk dengan kritis, dan pasrah dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>34</sup>

Respon seorang Gus Dur terhadap *local wisdom* sebagai gejala Islam di Indoonesia, maka beliau mengemukakan beberapa gagasan mengenai Islam Indonesia, yang pastinya Islam Indonesia memiliki beberapa karakteristik berbeda dengan Islam yang berada di negara Arab, Irak, Mesir dan negara lainnya.

1. Islam di Indonesia tidak dianggap sebagai alternatif ideologi, melainkan hanya dipandang sebagai faktor komplementer saja dalam kehidupan sosial, kultural, dan politik.
2. Sikap toleran dan mempertahankan budaya lokal, dimana para ulama memandang perlunya mempertimbangkan konteks lokal Indonesia ketika menerapkan ajaran Islam.

---

<sup>34</sup> Delhpine Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy: Transcending the State*, 2015, Routledge, 78.

3. Progresif, bahwa Islam tidak menafikan beberapa paham yang datang dari Barat, melainkan harus bisa berlapang dada untuk berdialog dengan tradisi pemikiran orang lain diluar dari pemikiran Islam.
4. Hal paling penting dikala Islam harus berperan aktif di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, tanpa harus memnadang etis, budaya, ras dan lainnya. Islam harus bersifat universal tanpa mengkotak-kotakan suatu pemahaman. Dengan adanya sikap sepeerti ini, maka masyarakat akan merasa lebih sipatisan terhadap agam Islam, karena Islam dipandang sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.<sup>35</sup>

Adapun beberapa ciri umum dari ungkapan Islam moderat,

1. Menerima dan berdiam dalam lingkaran demokrasi, tidak menampilkan sesuatu yang berasal dari Barat. Penerimaan akan demokrasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Prinsip *shura* dipandang sebagai sinonim dari demokrasi.
2. Para aktifis Islam moderat berkeyakinan bahwsannya tidak ada yang dapat mewakili Allah, dalam artian negara demokrasi berarti negara yang menolak gagasan negara Islam yang dikendalikan oleh para petinngi agama di negaranya, karena itu sebuah interpretasi manusia terhadap hak-hak Allah.
3. Penerapan *syari'at* menjadi salah satu ciri yang khas antara Islam moderat dan Islam liberal. Islam moderat tafsir tradisonal terhadap *syari'ah* Islam tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak menghormati prinsip HAM.
4. Islam moderat merangkul semua kalangan tanpa ada sekat antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak perempuan sebagai layaknya seorang penganut agama

---

<sup>35</sup> Delhpine Alles, *Transnational Islamic*, 56.

Islam serta memberikan hak terhadap masyarakat minoritasa dalam menjalankan aktivitas mereka sebagaimana mestinya, menebar perdamaian terhadap beberapad perbedaan yang terjadi di masyarakat.

5. Menolak segala bentuk kekerasan dalam *syi'ar* Islam, seperti halnya terorisme dan kekerasan illegal yang dipengaruhi oleh paham impor dari luar.<sup>36</sup>

Tidaklah sulit untuk mencari referensi mengenai Islam moderat baik ditempat lahirnya Islam dan di Indonesia. Jika di wilayah tempat lahirnya Islam, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya al-Khulafa al-Rashidin, sedangkan dalam konteks Indonesia Walisongo dapat dijadikan referensi sebagai penyebaran Islam di Indonesia. Islam di Indonesia di zaman sekarang yang menjadi miniatur Islam moderat yakni NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Sikap moderat yang ditunjukkan Nu dan Muhammadiyah diantaranya melalui institusi pendidikan, serta berperan aktif dalam kancah social, politik dan keagamaan. NU dan Muhammadiyah berperan aktif dalam memelihara institusi penyangga modernisasi Islam dan melebarkan jaringan, dengan tujuan memperkenalkan Islam Indonesia sebagai Islam yang mengedepankan sikap toleransi sebagai percontohan Islam dunia.

NU (Nahdlatul Ulama) lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya, dan Muhammadiyah didirikan pada 12 Nopember 1912 M di Yogyakarta.<sup>37</sup> Peran penting NU dan Muhammadiyah ditengah masyarakat Muslim Indonesia tiada lain untuk membendung gelombang radikalisme yang datang dari berbagai kelompok Islam radikal. Nampak mereka membawa jargon

---

<sup>36</sup> <http://www.205-Article%20Text-1587-4-10-20171106.pdf>, diakses tgl 26 November 2017. 08:37

<sup>37</sup> Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam: Memperkuat Epistemologi Islam dalam Pendidikan*, 2014, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 244-250.

bahwasanya ingin memurnikan Islam dikalangan masyarakat Indonesia, yang dalam waktu dekat ini Islam di Indonesia telah melenceng dari *syari'at* Islam yang sebenarnya. Dengan demikian, jelaslah salah satu agenda Islam moderat di Indonesia berupaya membangun kesaling-pahaman (*mutual understanding*) antara peradaban kelompok Islam di Indoensia.<sup>38</sup>

NU dan Muhammadiyah sebagai dua institusi *civil society*, yakni sebagai organisasi Islam yang beradab dalam membangun masyarakat, hal tersebut merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kesetabilan masyarakat. Merupakan gambaran penyebaran Islam ketika awal masuk ke Indonesia, tanpa ada paksaan, pendiskriminasian, dan kekerasan, karena agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Sikap NU tidak terlepas dari Aqidah *Ahlusunnah Waljama'ah*, dimana aqidah tersebut digolongkan sebagai aqidah yang moderat. Aqidah *Ahlusunnah Waljama'ah* yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. NU juga sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah*, dan mengklaim atas madzhab fiqih yang empat yakni Imam Syfi'I, Imam Hambali, Imam Hanafi. dan Imam Maliki.

Perkembangan masyarakat di kalangan NU selalu menghargai budaya dan tradisi lokal. Mereka lebih mengedepankan ajaran Islam yang bersifat toleran pada budaya lokal dan sosial kemasyarakatan. Apa yang terjadi bukanlah sebuah intervensi, tetapi lebih merupakan sebuah akulturasi hidup berdampingan secara damai. Ini merupakan sebuah ekspresi dari "Islam kultural" atau "Islam moderat" semua itu tidak lepas dari peran para ulama dalam penyebaran Islam.

---

<sup>38</sup> M. Hilaly Basya, *Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia*, <http://www.205-Article%20Text-1198-1-10-20170213.pdf>. diakses tanggal 25 November 2017.

Ulama berperan tidak hanya dalam ruang lingkup agamanya saja, melainkan mereka berperan dalam sosial, budaya masyarakat setempat, dan berusaha bagaimana agama Islam bias diterima dikalangan masyarakat tanpa harus merubah budaya setempat. Menghargai budaya lokal itulah ciri khas mereka dalam penyebaran Islam, dengan dengan cara mensubordinasi budaya tersebut kedalam nilai-nilai Islam. Hal tersebut tidak lepas dari jasa para ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia.<sup>39</sup>

Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Ada beberapa aspek konstruktif yang dijadikan asas NU yaitu nilai-nilai persaudaraan yang kita kenal dengan sikap *ukhuwah*. Dalam moderasi yang dibangun berdasar sikap *ukhuwah* ini, sebagaimana yang dirumuskan oleh KH. Akhmad Siddiq, yaitu tiga konsep model persaudaraan yaitu *al-ukhuwah al-Islamiyah* (persaudaraan ke islaman), *al-ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan kebangsaan), *al-ukhuwah al-basyariyyah* (persaudaraan kemanusiaan).

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU Prinsip-prinsip dasar yang

---

<sup>39</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, 2014, Yogyakarta: LKiS, 9.

dicanangkan NU telah diterjemahkan dalam perilaku kongkrit. NU banyak mengambil kepeloporan dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi ini hidup secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>40</sup>

“Kristalisasi Ideologi dan *Khittah* Muhammadiyah”, yang salah satu keputusannya menyebutkan bahwa ideologi Muhammadiyah ialah “ideologi Islam yang berkemajuan yang memandang Islam sebagai *dîn al-hadârah*. Ideologi berkemajuan ini ditandai dengan beberapa karakter, yaitu *tajdîd* kembali kepada al-Qur’an dan Hadis, atau istilah lainnya dengan modernisasi Islam, pembaharuan. Bentuk dari tajdid tersebut tercermi dari beberapa tafsir yang dikarang oleh ulama Muhammadiyah diantaranya Mahmud Yunus. Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim karangan Mahmud Yunus merupakan tafsir yang memiliki corak pembaharuan atau tajdid, tafsir tersebut mengajak umat Islam supaya lebih maju dalam berbagai hal, terutama dalam bidang pendidikan . Maka tidaklah heran ketika Muhammadiyah memiliki jargon Islam berkemajuan.

Muhammadiyah mengembangkan metode ijtihad untuk menjawab suatu permasalahan yang hidup ditengah masyarakat modern dan tradisional, bercorak reformis-modernis dengan sifat *wasatîyah* (tengah, moderat) untuk membedakannya dari ideologi-ideologi lain yang serba ekstrem; Muhammadiyah mengedepankan sikap prokemajuan dan anti-kejumudan, properdamaian dan anti-kekerasan, prokeadilan dan anti-penindasan, prokesamaan dan anti-dikriminasi; serta menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang autentik sesuai jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah dengan watak ini berbeda dengan karakter gerakan-gerakan Islam lain yang cenderung

---

<sup>40</sup> Dinduh dari situs resmi Nahdlatul Ulama, <http://www.nu.or.id> diakses tgl 26 November 2017, 11:43.

ekstrem, baik yang bersifat radikal-fundamentalis ataupun radikal liberal.<sup>41</sup>

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam (*da'wah ila al-Khair*), menyuruh pada yang ma'ruf (*al-amr bi al-ma'ruf*), dan mencegah dari yang munkar (*al-nahy 'an al-munkar*) dan sunnah Nabi sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang shahih. Muhammadiyah juga mengikuti perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Muhammadiyah dengan watak ideologi moderat, dalam artian Muhammadiyah bukan Islam yang anti terhadap paham-paham diluar Islam, melainkan Muhammadiyah mengedepankan sikap toleran terhadap umat-umat yang lainya. Muhammadiyah menjadi tengahan antara paham liberalisme dan paham radikalisme. Kedua paham tersebut tidak memberikan sedikit celah terhadap perbedaan sebuah ideologi seolah tidak wajib sikap toleran baginya. Maka Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki sikap moderat.

Tidak hanya sampai disitu, ideologi moderat Muhammadiyah juga berkontribusi terhadap lembaga Pendidikan. Selain berdakwah, cita-cita utama Muhammadiyah adalah mementingkan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan ajaran Islam moderat, baik pendidikan di sekolah/madrasah ataupun pendidikan dalam masyarakat. Dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2010 Muhammadiyah memiliki 4.623 Taman Kanak-Kanak; 6.723 Pendidikan Anak

---

<sup>41</sup> Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, 2015, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 183.

Usia Dini; 15 Sekolah Luar Biasa; 1.137 Sekolah Dasar; 1.079 Madrasah Ibtidaiyah; 347 Madrasah Diniyah; 1.178 Sekolah Menengah Pertama; 507 Madrasah Tsanawiyah; 158 Madrasah Aliyah; 589 Sekolah Menengah Atas; 396 Sekolah Menengah Kejuruan; 7 Muallimin/Muallimat; 101 Pondok Pesantren; serta 3 Sekolah Menengah Farmasi. Dalam bidang pendidikan tinggi, sampai tahun 2010, Muhammadiyah memiliki 40 Universitas, 93 Sekolah Tinggi, 32 Akademi, serta 7 Politeknik.<sup>42</sup>

Alhasil di Indonesia terdapat dua Organisasi Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan NU, keduanya sering dianggap sebagai mainstream Islam Indonesia. Kedua ormas Islam ini, mempunyai misi untuk mewujudkan Islam moderat di Indonesia.

### **C. Agen-agen Islam Moderat di Adelaide**

Diantara agen yang mempromosikan Islam moderate di Adelaide, Australia Selatan adalah CITE (Centre for Islamic Thought and Education) atau Pusat Pemikiran dan Pendidikan Islam. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Fakultas pendidikan atau Faculty of Education, University of South Australia. Lembaga ini sangat penting keberadaannya untuk mengklarifikasi imej negative tentang Islam di Barat pada umumnya dan masyarakat Australia pada khususnya. Prof Tanya Monro (Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, University of South Australia mengatakan bahwa komunitas kami (Australia) sering disuguhi informasi-informasi yang salah tentang Islam. Karenanya keberadaan CITE sangatlah penting dan bisa dijadikan pusat informasi dan kajian tentang Islam yang sebenarnya (CITE Booklet, 2017: 1). Senada dengan

---

<sup>42</sup> Diunduh dari situs resmi Persyarikatan Muhammadiyah: <http://www.muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah.html>, dikutip tgl 26 November 2017, 11:29.

Monro, direktur CITE Prof Abdalla menyebutkan signifikansi didirikannya lembaga ini dengan mengatakan bahwa: “saya mendambakan lembaga ini (CITE) menjadi kendaraan yang *powerful* yang akan membantu mengkontekstualisasi pemahaman Islam bagi masyarakat Australia sehingga bisa bekerjasama dan bukan bersebrangan dengan konteks masyarakat Australia yang multikultur.

Karenanya, dengan didirikan lembaga ini, diharapkan akan tumbuh dan berkembang pemikiran Islam dalam memberdayakan masyarakat terutama masyarakat Australia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya melalui kajian-kajian penelitian dan pendidikan. Filosofi pendirian lembaga ini adalah untuk mempromosikan penelitian berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dibentuk oleh metodologi, filosofi dan pedagogi Islam, terkait dengan konteks Australia yang unik (CITE Booklet, 2017; 4). Para pendiri dan orang-orang yang terlibat di CITE meyakini bahwa riset dan pendidikan harus mempunyai dampak yang positif dan berdayaguna bagi masyarakat. Dalam mencapai itu maka keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya masyarakat, tetapi juga media, pemerintah dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat. Sinergi berbagai pihak ini diharapkan bisa mengembangkan riset yang berdaya guna bagi masyarakat secara luas terutama dalam memberikan pemahaman Islam yang tidak monolitik.

Untuk tujuan di atas, lembaga CITE tidak berdiri sendiri dalam melakukan kegiatan dan programnya. Mereka mencoba merangkul ahli-ahli riset dalam bidang peradaban Islam, psikologi, etika, kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pendidikan. Para staf akademisi yang terlibat di CITE memiliki pengalaman akademis yang sangat luas dalam studi Islam, dan yang lebih penting, pengertian yang sangat dalam tentang

kebutuhan dan impian masyarakat Islam di Australia. Para pengelola CITE ini sudah sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat selama dua dasa-warsa terakhir ini dan mereka sangat cocok untuk menimba masalah yang menyangkut anggota masyarakat serta melibatkan anggota masyarakat dengan cara yang holistik dan kokoh.

Harapan terhadap lembaga ini tentu saja cukup besar. Lembaga CITE diharapkan akan berdampak besar dan berkelanjutan dalam mereduksi imej negatif Islam dan orang Islam dan hubungan mereka di Australia dan di dunia. Karenanya lembaga ini berusaha menciptakan model-model penelitian, pendidikan dan keterlibatan masyarakat yang didasarkan pengertian mendalam tentang Islam dan orang Islam, didasarkan tradisi suci Islam dan realitas masa kini.

### **1. Abdalla: Ikon CITE dan Tokoh Muslim Moderat Australia dalam *"Building Bridges between Cultures"***

Prof. Mohammad Abdalla adalah diantara akademisi Muslim moderat yang dihormati dan disegani di Australia karena keilmuan dan aktivitas keagamaannya. Ia bukan hanya berkedudukan sebagai direktur CITE tapi juga dipandang sebagai tokoh agama Islam yang sering mewakili kalangan umat Islam Australia dalam kegiatan-kegiatan atau forum-forum dialog agama dan keislaman. Ia adalah Guru Besar bidang Studi Islam yang juga pendiri CITE.

Pada tahun 2006, mula-mula ia mendirikan kajian Islam sebagai disiplin Ilmu atau program studi di Griffith University, Queensland, Australia. Di universitas tersebut ia juga membidani lahirnya Griffith University Islamic Research Unit (GIRU). Dari tahun 2006-2008, Abdalla menjabat sebagai Direktur GIRU. Selama menjabat Abdalla aktif mencari dana baik itu dari

sumber dana local nasional maupun dana internasional untuk yang dipergunakan untuk mengumpulkan akademisi serta mahasiswa tingkat doctoral yang ahli dalam bidang islam dan konteks Australia. Dia membimbing lebih dari sepuluh PhD, dua diantaranya mendapatkan prestasi sangat baik dengan bukti mendapatkan penghargaan *Chancellor's Award for Academic excellence*.

Pada tahun 2008, Prof. Abdalla bersama kolega-koleganya dari University of Melbourne dan University of Western Sydney berhasil mendapatkan funding sebesar \$8 Million (8 juta dollar Australia) dari Pemerintah Australia untuk mendirikan konsorsium kajian keislaman kerjasama tiga universitas di Australia. Nama konsorsium itu adalah The National Centre of Excellence for Islamic Studies (NCEIS). Dari tahun 2008 sampai tahun 2016, Abdalla juga menjabat sebagai Director of the Queensland Node of the National Centre of Excellence for Islamic Studies (GU Node).

Dalam karir akademiknya, beberapa mata kuliah ia ajarkan di beberapa universitas. Diantara mata kuliah keahliannya adalah *Great Empires of Islamic Civilisations; Islamic Law in a Changing World; Introduction to Sharia; and Islam and the Making of Europe*. Fokus risetnya adalah tentang Islam di Australia, Pemikiran dan Peradaban Islam serta Hubungannya dengan Barat. Abdalla telah menerbitkan banyak karyanya yang berkaitan dengan studi Islam. Diantara karyanya yang berbentuk buku dan artikel jurnal yang diterbitkan di *Griffith Law Review*, Routledge; Palgrave Macmillan; *Journal of Muslim Mental Health*; Edward Elgar; *Journal of Sociology*; and the *Australian Journalism Review*.

Prof Abdalla pernah menduduki banyak jabatan di berbagai organisasi diantaranya Chairperson of the Queensland Government Muslim Community Reference Group (MCRG),

Vice-president for the Australian National Imams Council (ANIC); the Queensland Cultural Diversity Roundtable for the Office of the Hon. Glen Elmes MP, Minister for Aboriginal and Torres Strait Islander and Multicultural Affairs and Minister Assisting the Premier; and Vice-President of the office of Al-Azhar University in Sydney.

Professor Abdalla sering diundang sebagai dosen tamu dalam berbagai isu tentang Islam dan Muslim baik itu oleh universitas-universitas di Australia maupun di universitas lainnya di luar Australia. Ia sering dimintai komentar oleh para media Australia tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan Islam dan dunia Islam. Prof. Abdalla adalah salah satu diantara orang 1000 orang Australia yang diminta untuk bergabung dalam Prime Minister Kevin Rudd's 2020 Summit. Ia juga merupakan duta tamu Australia bagi Amerika ( Guest of the Australian Ambassador to the USA) pada tahun 2008 yang ditugaskan untuk memformalisasi hubungan antara tokoh-tokoh Muslim Australia dan Amerika dan untuk membuat hubungan, kerjasama serta saling memahami antar kedua belah pihak untuk program jangka panjang. Ia juga merupakan orang Muslim Australia pertama yang diminta untuk menyampaikan hutbah Jumat di United States Capitol building, Capitol Hill, Washington, D.C. Prof. Abdalla juga pernah diundang untuk melakukan kunjungan diplomatic ke Brunei Darussalam untuk menyampaikan ceramah tentang Islam di Australia.

Sejak kejadian tragis 11 September 2001 di Amerika serta peristiwa pembakaran mesjidnya di Kuraby, Brisbane, Australia, Professor Abdalla tanpa lelah membuka dan membangun dialog dengan tokoh-tokoh dari berbagai agama. Setelah 9/11, dia telah berhasil memimpin rekonsiliasi antara Muslim Australia dan komunitas Australia lainnya yang membawanya membuat jembatan penghubung (building bridge) saling memahami. Pada

tahun 2007, usaha kerasnya itu dimuat dalam sebuah artikel panjang dalam surat kabar *The Courier Mail* dengan judul “Building Bridges between Cultures”, yang ditulis oleh wartawan Suzanna Clarke, seorang wartawan yang pernah memenangkan a Queensland Media Award atas tulisan artikel tentang Abdalla ini. Prof. Abdalla juga pernah menjadi seorang panellist dalam TV ABC Australia dalam program Tanya jawab tentang Cinta dan Keyakinan (Love and Faith). Penampilannya yang artikulatif dan meyakinkan mendapatkan respon yang positif dari komunitas masyarakat Australia secara umum. Pada tahun 2015, Abdalla dipilih oleh pemimpin-pemimpin agama di Queensland untuk merespon ceramah yang disampaikan oleh Dalai Lama di St John’s cathedral di Brisbane yang dihadiri oleh lebih dari seribu orang audiens.

Prof Abdalla menerima berbagai macam penghargaan untuk aktivitas pengabdianya pada masyarakat Australia, diantaranya ia mendapatkan: 2015 Lord Mayor’s Australia Day Achievement Award, the 2013 Ambassador of Peace Award; Islamic Council of Queensland Community Service Award (2013); Community Leadership Award (2014); the Australian Muslim Man of the Year Award (2008); dan menjadi finalist pada the Pride of Australia Award (2010).

Diantara karya buku dan tulisan ilmiah di jurnal bereputasi yang pernah ditulis Abdalla antara lain: 1). *Islamic schools in the West: Pathways to renewal* (Palgrave MacMillan, 2017), 2) *Leadership in Islam: Processes and Solutions in Australian Organizations* (Palgrave MacMillan, 2017), 3). *Islam and the Australian News Media*.) Melbourne: Melbourne University Press, 2010) 4). *Waqf institutions in Non-Muslim contexts: the case of Australia. Awqaf Journal* (2017), 5). *Towards the formulation of a pedagogical framework for Islamic schools in Australia. Islam and Civilizational Renewal*. Vol 6, No 4, pp.509-532 (2015); 6). Ibn

Khaldūn: Historian, Philosopher and Sociologist, (The Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism (Wiley-Blackwell, 2015), 7). Understanding Violent Radicalization amongst Muslims: A Review of the Literature and the Australian Context. (*Journal of Psychology and Behavioural Science*, Vol. 1 No. 1; December 2013; 8). Shari'a Law and Khat (Catha edulis): Views of Australian Imāms (*International Journal of Humanities and Social Sciences*. Vol. 3, No. 21; 9). Religious Perspectives on the Use of Psychopharmaceuticals as an Enhancement Technology, (*Journal of Religion and Health*. Springer, 2013) dan 10). Radicalisation and Terrorism: Research within the Australian Context, (*International Journal of Criminology and Sociology*. 2, 180-185, 2013).

Melihat ketokohan Abdalla dan reputasinya seperti dijelaskan di atas, maka CITE sebagai lembaga riset dan pengajaran sangat memungkinkan untuk terus melakukan kajian dan mempromosikan nilai-nilai Islam dan keislaman yang sesuai dengan konteks Australia. Abdalla bersama koleganya di CITE terus memperjuangkan dan mempromosikan Islam yang moderat dan cocok dengan konteks Australia. Perjuangan itu tidak hanya bisa dilihat pada riset-riset yang dilakukan oleh CITE tapi juga pada kegiatan-kegiatan atau program CITE yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Jika melihat beberapa karya Abdalla yang sudah dipublikasikan, maka sebagai akademisi Muslim yang hidup pada masyarakat sekuler dan multikultur Australia, ia memiliki misi untuk mengklarifikasi bahwa Islam tidak identik dengan radikalisme. Dalam karyanya berjudul *Radicalization and Terrorism: Research within the Australian Context* (2013) misalkan, Abdalla membantah laporan serta klaim Mustapha Kara Ali (dari organisasi Muslim Community Reference Group yang dibentuk dibawah pemerintahan Howard tahun 2015) yang

menyebutkan bahwa hampir tiga ribu pemuda Muslim Australia cenderung bersikap radikal. Bagi Abdalla (2013:182), laporan dan temuan riset tersebut perlu dipertanyakan karena tidak dilakukan *peer reviewed* yang ketat serta tidak dipublikasikan dalam jurnal akademik ilmiah, dan karenanya temuannya perlu diragukan.

Untuk menguatkan bantahannya, Abdalla menyebutkan penelitian yang dilakukan oleh Woodlock dan Russell (2008) yang menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap enam ratus Muslim yang tinggal di New south Wales dan Victoria Australia dari tahun 2007 sampai tahun 2008, ditemukan bahwa sebagian besar atau mayoritas dari mereka menolak ekstrimisme. Berkaitan dengan beberapa kajian riset tentang radikalisme Islam di Australia, Abdalla menyebutkan perlu adanya kritik dan beberapa catatan. *Pertama*, kebanyakan kajian-kajian risetnya tidak dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang kredible. Tidak diterbitkannya hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan hanya berupa laporan untuk saran kebijakan menunjukkan bahwa kualitas risetnya perlu dipertanyakan. *Kedua*, penelitian-penelitian tentang terorisme di Australia yang selalu dikaitkan dengan Muslim, ternyata para penelitiannya tidak memiliki akses langsung terhadap pelaku terorisme. *Ketiga*, meskipun penelitian-penelitian itu seolah-olah menarik kesimpulan yang canggih tentang radikalisasi, penelitian itu lemah dalam beberapa poin investigasi. Contohnya, teori-teori tentang *moral disengagement* dan manajemen terror tidak digunakan dalam melakukan investigasi penelitian tentang teroris. Lebih jauh, kemungkinan adanya factor resiko lainnya tidak dilaporkan dan proses kognitif termasuk kemungkinan adanya bias yang bisa membawa akan konversi ideology pelaku terror juga tidak dieksplorasi lebih dalam. Kelemahan-

kelemahan ini menurut Abdalla perlu diperhatikan ketika mengkaji isu terorisme di Australia.

Dalam tulisannya, Prof. Abdalla juga lebih jauh menyebutkan bahwa diperlukan studi-studi lanjutan tentang terorisme di Australia dengan menggunakan metode empiris. Contohnya, menggunakan pendekatan lintas metodologi serta diperlukan studi jangka panjang yang berkelanjutan. Riset interdisiplin dan wawancara kualitatif akan memperkuat pengetahuan yang lebih dalam tentang mengapa radikalisme muncul di Australia. Studi atau riset perbandingan antara Muslim yang terlibat proses radikalisme dengan Muslim yang menolak radikalisme juga akan memperkaya literatur tentang radikalisme di Australia.

Untuk menunjukkan bahwa Muslim Australia tidak sepakat dengan radikalisme dan justru mendukung multikulturalisme dan nilai-nilai demokrasi, Abdalla melakukan penelitian lain yang hasilnya dipublikasikan dalam *Journal of Sociology* (2010) dengan judul *Towards understanding what Australia's Muslims really think*. Dalam penelitian ini Abdalla berusaha untuk mengidentifikasi sikap, opini dan persepsi Muslim Australia berkaitan dengan isu-isu social dan kebijakan public yang disorot media terutama berkaitan dengan warga Muslim Australia. Isu-isu sensitive seperti integrasi, kesetaraan gender, kekerasan dan terorisme, demokrasi serta persepsi Muslim tentang Barat dicoba didiskusikan dalam penelitian Abdalla. Hasil penelitian Abdalla ini menunjukkan koreksi atas pendapat public Australia terutama media dan politisi Australia yang sering mengatakan bahwa Muslim Australia tidak mau berintegrasi, memegang nilai-nilai keislaman yang berbeda dengan public Australia secara umum, mendukung kekerasan dan terorisme serta menolak system demokrasi dan institusi Australia.

Meskipun penelitian ini hanya dilakukan di negara bagian Queensland Australia, fenomena bahwa Muslim mendukung integrasi, menolak kekerasan dan setuju dengan nilai-nilai demokrasi, merupakan fenomena umum di kalangan Muslim di seluruh Australia. Abdalla dalam penelitiannya mengambil sampel 500 warga Muslim Queensland yang berusia di atas 18 tahun.

### *Identitas dan Integrasi: Muslim dan Ke-Australiaan*

Menurut hasil kajian Abdalla, hampir setengah responden (49%) mengidentifikasi diri mereka pertama-tama sebagai Muslim dan kemudian sebagai warga Australia. Meskipun demikian 29 persen menyebutkan bahwa mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim dan sebagai Australian secara seimbang (equal). Dan ketika mereka ditanya tentang bagaimana perasaan mereka tentang integrasi, ada 71 persen warga Muslim menyebutkan bahwa Muslim Australia harus berintegrasi dengan masyarakat Australia secara umum dengan cara belajar bahasa Inggris, berintegrasi dalam hal social, ekonomi dan politik tetapi tetap mempertahankan identitas keagamaan, dan sekitar 13 persen responden menjawab bahwa Muslim harus secara total berintegrasi dengan masyarakat Australia.

Dengan hasil kajiannya, nampak bahwa Abdalla ingin agar publik Australia tahu bahwa Muslim Australia itu tidak seperti yang mereka sangka tidak mau berintegrasi dengan nilai-nilai masyarakat Australia. Kajian ini tentu sangat signifikan dalam mengubah persepsi negative tentang Muslim di Australia. Apalagi kajian ilmiahnya dipublikasikan dalam journal yang mempunyai reputasi bagus dikalangan akademisi Australia. Kajian yang dilakukan Abdalla ini bisa membantu membangun jembatan "bridge" dalam upaya saling memahami

antara dua budaya yang berbeda, budaya Islam dan budaya sekuler Australia. Dengan saling memahami maka integrasi masyarakat Muslim Australia akan berlangsung dengan damai dan jauh dari prasangka atau *prejudice* diantara keduanya.

### ***Pandangan Muslim Australia tentang Demokrasi***

Untuk menunjukkan bahwa Muslim Australia menerima nilai demokrasi yang dianggap produk Barat dan hanya sesuai dengan nilai-nilai Barat, Abdalla menanyakan kepada responden tentang respon mereka terhadap ungkapan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan Barat dan tidak cocok atau tidak kompatibel dengan Islam. Jawaban yang mengejutkan dari hasil penelitian Abdalla adalah bahwa 74% responden menolak statemen tersebut dan bahkan 50% responden menambahkan bahwa kebanyakan aspek-aspek dan nilai-nilai Islam justru berkesesuaian dengan demokrasi dan 24% responden menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak setuju dengan ungkapan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi.

Sebenarnya dukungan Muslim terhadap demokrasi bukanlah khas pandangan Muslim Australia tetapi temuan ini konsisten dengan trend Muslim di dunia. Berbagai survey yang dilakukan di dunia Islam menunjukkan hasil bahwa Muslim mempunyai tuntutan yang kuat untuk demokratisasi; kebanyakan Muslim percaya bahwa demokrasi akan bisa berjalan di negara mereka. Studi yang dilakukan sebagai bagian dari Pew Global Attitude Survey tahun 2005 menunjukkan bahwa mayoritas Muslim di Maroko (83%), Libanon (83%), Yordania (80%), dan Indonesia (70%) mendukung proses demokratisasi. Penelitian yang lebih baru oleh World Public Opinion (2008) yang berjudul *Pandangan Publik Dunia tentang Pemerintahan dan Demokrasi* menunjukkan bahwa di seluruh

19 negara yang di survey, mayoritas responden Muslim mendukung prinsip-prinsip demokrasi (Kull, 2008).

### *Pandangan Muslim Australia tentang Kesetaraan Gender*

Berkaitan dengan isu bahwa Islam tidak menghargai wanita dan wanita dianggap keas kedua di dunia Islam, Abdalla memberikan pertanyaan kepada responden tentang apakah mereka percaya bahwa Islam mendukung kesetaraan gender. 89 persen responden menjawab dengan yakin bahwa Islam mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan. Temuan Abdalla ini semakin menguatkan bahwa anggapan Muslim tidak sensitive gender adalah salah. Abdalla ingin menunjukkan kepada public Australia bahwa Islam dianggap agama yang bias gender dan agama misoginis adalah persepsi yang salah atau miskonsepsi yang dibangun media. Diantara responden yang mempunyai komitmen paling kuat atau kuat terhadap nilai-nilai Islam, 94% dan 89% setuju bahwa Islam mendukung kesetaraan gender.

Tentu saja, meskipun Abdalla merupakan direktur CITE dan tokoh yang mempunyai peran signifikan dalam pengembangan proyek-proyek serta visi dan misi CITE, bukan berarti bahwa akademisi-akademisi lain yang ada di CITE tidak berperan. Kesuksesan Abdalla dalam mempromosikan CITE ke public Australia dan berjalannya program CITE karena dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat aktif dan memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga ini. Diantara para pegiat CITE lainnya adalah:

## **2. Dr. Dylan Chown**

Dylan Chown adalah Research Fellow dan Program Director for Islamic Education di CITE dan di School of Education. Dia adalah anggota dari lembaga Pedagogies for Justice and Wellbeing research group. Dylan memiliki pengalaman selama dua puluh tahun dalam bidang pendidikan dengan kombinasi berbagai peran baik sebagai guru, kepala sekolah, konsultan, peneliti dan dosen. Dia sangat tertarik dengan kajian sekolah Islam dan pendidikan Islam di Australia. Dylan juga merupakan anggota dari organisasi International network of educators on the Islamic Teacher Education Program (ITEP). Ia menyelesaikan studi Master of Education (Leadership) di Griffith University. Diantara focus kajian risetnya adalah pedagogi Islam, pendidikan karakter, dan metodologi riset tentang Islam. Dylan terlibat dalam berbagai proyek riset di CITE seperti riset tentang Islamic schooling renewal (Pembaharuan sekolah Islam), pengembangan desain Kurikulum Studi Islam Nasional serta riset tentang pendidikan karakter. Sebelumnya, Dylan adalah ketua Amanah Institute di Brisbane, Queensland. Dialah yang pertama-tama melakukan proyek pengembangan institut Amanah yang memprioritaskan pendidikan dan transformasi madrasah di Australia. Dylan adalah anggota penasihat Council of Imams Queensland (CIQ) dan menjadi ketua penghubung antara Muslim local dengan komunitas Aborigin.

### **3. Dr. Mahmood Nathie**

Dr Mahmood Nathie adalah sarjana dan praktisi keuangan Islam. Dia mendapatkan gelar PhD dengan hasil yang memuaskan dari Griffith University, Australia. He memperoleh gelar master dalam bidang Ekonomi, Pajak dan Keuangan. Dia mempublikasikan karyanya dalam berbagai jurnal bereputasi dan menjadi pembicara masalah-masalah keuangan di berbagai

konferensi internasional. Dia juga merupakan salah satu pendiri National Centre of Excellence in Islamic Studies dan juga pendiri Centre of Islamic thought and Education at UniSA. Dr. Nathie mempunyai pengalaman empat puluh tahun bergelut dalam bidang keuangan. Sekarang ia mengajar bidang keuangan Islam. Dalam karirnya dia menjabat berbagai jabatan pada institusi-institusi keuangan Islam.

#### **4. Dr. Nada Ibrahim**

Nada Ibrahim adalah Senior Research Fellow with the Centre for Islamic Thought and Education (CITE). Latar belakang pendidikannya adalah multi disiplin termasuk di dalamnya Psikologi Islam, pendidikan dan kriminologi. Diantara keahliannya adalah menyelesaikan konflik dan kekerasan dalam keluarga yang sering terjadi karena disebabkan oleh perbedaan budaya dan keyakinan. Diantara proyek yang pernah dilakukannya adalah tentang *Domestic Violence Prevention Month 2017*, sebuah workshop yang didanai oleh Queensland Government dengan tema *inspired NAFSi takes on Gender Inequality* (bekerjasama dengan Kuraby Mosque) dan program *We can Stop DV* (bekerjasama dengan Islamic Women's Association of Queensland). Begitu juga Nada pernah terlibat dalam *Muslim Leaders Empowerment Program* yang dibiayai oleh Queensland Government.

Itulah diantara tokoh-tokoh CITE yang membantu direktur CITE Abdalla dalam mempromosikan dan mencapai tujuan dari CITE dalam melakukan kajian serta ikut mereduksi kesalahan persepsi tentang Islam dan Muslim di Australia dengan berbagai program dan kegiatannya. Meskipun dibantu dengan beberapa akademisi yang memadai, tetap saja yang menjadi ikon CITE dan selalunya lembaga ini identic dengan sang direktur Prof. Mohamad Abdalla.

#### **D. Fokus Riset CITE: Dari Hubungan Islam dan Barat Sampai Kekerasan Domestik**

Sejalan dengan visi, misi serta filosofi pendiriannya yaitu untuk mempromosikan penelitian berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dibentuk oleh metodologi, filosofi dan pedagogi Islam, terkait dengan konteks Australia yang unik, CITE memiliki focus kajian yang cukup beragam. Dalam Booklet CITE (2017) disebutkan bahwa kajian-kajian riset yang mereka lakukan termasuk di dalamnya adalah tentang: 1). Hubungan antar peradaban: Islam dan Barat; 2). Kontekstualisasi Pemikiran Islam; 3). Pembaharuan Sekolah Islam (Efektivitas, Kualitas, Pedagogi dan kurikulum pendidikan Islam); 4). Manajemen dan Kepemimpinan: Teori dan Praktek (Kombinasi antara teori Kontemporer dan Nilai-nilai Islam); 5) Islam di Australia: Budaya dan Identitas; 6). Perbankang dan Keuangan Islam; dan 7). Kekerasan Domestik dalam Keluarga Multikultur dan Multiagama.

Dari focus kajian riset di atas, kita bisa melihat bahwa kajian riset yang dilakukan oleh CITE berusaha menampilkan wajah Islam yang moderat dan kontekstual dengan waktu dan tempat. CITE nampaknya berusaha mengkaji dan mempromosikan pandangan bahwa antara Islam dan Barat jangan didikotomikan tetapi bisa saling bersinergi. CITE nampaknya tidak sepakat dengan teori *Clash Civilization*-nya Huntington yang menyebutkan bahwa ada benturan peradaban antara Barat dan Islam. Atau jika thesis Huntington itu dianggap ada benarnya, maka yang ingin dilakukan CITE justru mencoba mengkaji dan membuat jembatan penghubung antara Islam dan Barat.

Untuk menjembatani hal tersebut, nampaknya CITE melihat bahwa sekolah bisa dijadikan pintu masuk untuk

mensosialisasikan hubungan antara Islam dan Barat. Karenanya, kajian riset CITE selanjutnya adalah dengan mencoba mengkaji dan melakukan riset bagaimana memperbaharui sekolah Islam dari sisi pengajaran, efektivitas bahkan kurikulum sekolah-sekolah Islam di Australia.

Mengkombinasikan atau mengintegrasikan identitas ke-Islaman dan ke-Australia-an nampaknya juga menjadi concern CITE dalam penelitiannya. Dalam proses integrasi itu, CITE berusaha mengkaji bagaimana masyarakat Muslim Australia melakukan negosiasi identitas antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai nasional Australia (Barat). Kajian yang sudah dilakukan oleh Abdalla seperti disebutkan di atas nampaknya terus dilanjutkan sampai sekarang.

Untuk melihat apakah benar Islam adalah masyarakat yang anti kesetaraan gender, CITE juga memfokuskan kajiannya pada isu-isu gender yang berkembang pada masyarakat Muslim Australia. Kajian tentang kekerasan dalam keluarga atau kekerasan domestik dalam keluarga yang multi-agama dan multi kultur menjadi focus kajian CITE. Dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci tentang focus kajian yang dilakukan oleh CITE.

## **1. Riset Pembaharuan Sekolah Islam**

Riset ini focus pada pengkajian empirik dengan melakukan observasi di sekolah-sekolah Islam Australia untuk memahami bagaimana teori pedagogi Islam dimanifestasikan dalam struktur, kultur, dan praktek pedagogis di sekolah. Fokus penelitian CITE dalam hal ini bertujuan untuk menginformasikan perlunya pembaharuan sekolah Islam, pelatihan guru dan lebih luas lagi mencari format pendidikan inklusif di sekolah-sekolah Islam di Australia. Karenanya,

termasuk dalam kajian ini adalah karakter pendidikan sekolah Islam, respon pedagogis baik secara kultural maupun agama terhadap kelas yang multikultur dan pendidikan inklusif.

CITE juga melakukan kajian tentang kurikulum nasional studi Islam di Australia. CITE mengumpulkan data secara nasional dari berbagai stakeholder sekolah-sekolah Islam di seluruh Australia (siswa, orang tua, guru, dan akademisi lainnya) untuk mencari jawaban bagaimana membentuk format kurikulum studi Islam di Australia. Hal ini dilakukan untuk upaya kontekstualisasi nilai-nilai Islam pada masyarakat Australia, sehingga nilai-nilai itu bisa diterima oleh masyarakat Australia secara umum. Proyek penelitian ini disupervisi oleh komite riset yang mempunyai spesialisasi dalam studi Islam, pedagogi Islam, serta ahli kurikulum.

Selain dua proyek riset di atas (berkaitan dengan riset tentang pendidikan Islam), CITE juga mengkaji tentang penerapan atau aplikasi Islam pada anak muda Islam Australia. CITE dalam hal ini berusaha mengumpulkan data untuk menilai relevansi program studi Islam (program dua tahun dan part time) yang ditawarkan kepada anak-anak muda Islam Australia di empat Negara bagian (New South Wales, South Australia, Victoria dan Queensland). Program ini menjadikan pemikiran kritis (critical thinking) sebagai alat bantu untuk memahami tradisi-tradisi Islam yang kaya serta memahami bagaimana anak-anak muda Islam Australia hidup dan tumbuh dalam konteks Negara Australia yang khas.

## **2. Riset Keuangan Islam**

Riset tentang keuangan Islam yang dilakukan CITE meliputi beberapa topik diantaranya: perilaku investasi Islam, perdagangan dan praktek finansial syariah dan relevansinya dalam hukum perdagangan kontemporer, keuangan-mikro

Islam, akuntansi Islam serta isu-isu pajak korporasi yang berkaitan dengan struktur sukuk Islam. Dua proyek penelitian yang menjadi focus kajian CITE sekarang diantaranya tentang literasi finansial dan training perdagangan saham real. Yang pertama adalah proyek penelitian jangka panjang yang dilakukan di Australia dan Indonesia dengan menganalisa literasi keuangan di kalangan Muslim dewasa dan anak sekolah. Proyek riset kedua adalah program pelatihan yang memungkinkan pelajar dan praktisi keuangan berhubungan atau terlibat dalam saham syariah dan sukuk. Para peserta dikenalkan kepada etika, prinsip-prinsip dan dasar-dasar keuangan Islam yang berlaku di pasar modal.

### **3. Riset tentang kepemimpinan dalam Organisasi Islam**

CITE melakukan kajian dan penelitian yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam organisasi-organisasi Islam. Penelitian ini termasuk didalamnya adalah: kompleksitas budaya pada organisasi-organisasi Islam di Australia (mengkaji adanya lapisan budaya bertingkat dan juga sub-kultur dalam hal kepemimpinan dan bagaimana hubungan ini bias mempengaruhi kepemimpinan organisasi), sikap dan perilaku pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan di Australia dan di Negara-negara Islam dengan kajian khusus tentang skil interpersonal pemimpin yang berhubungan dengan kecerdasan emosional, dan riset tentang kepemimpinan pengelolaan lembaga pendidikan Islam di Australia.

### **4. Riset tentang Kekerasan dalam keluarga multikultur**

CITE melakukan kajian atau riset pada wilayah yang cukup signifikan yaitu riset tentang Kekerasan Domestik dan Keluarga (KDK) pada komunitas Muslim yang secara kultur,

bahasa dan keyakinannya sangat multikultur. Penelitian yang sedang berlangsung diantaranya penelitian tentang: tantangan mengidentifikasi KDK dalam komunitas Muslim, korban KDK dan factor-faktornya dalam keluarga Muslim, pandangan ilmuan atau sarjana Muslim tentang surat 4 ayat 34 kaitannya dengan KDK, hubungan gender dalam konteks budaya dan agama, pengembangan respon strategis pendekatan budaya dan agama tentang KDK serta strategi komunitas Muslim dalam mencegah atau menanggulangi korban KDK.

#### **E. Usaha-Usaha Yang dilakukan Agen Islam Moderat di Bandung**

Muhammadiyah dan NU memperjuangkan untuk mengukuhkan Islam moderat, lebih ditekankan pada tataran teologis-kultural daripada politis. Muhammadiyah memiliki sejumlah lembaga pendidikan dengan ciri khas utamanya adalah adanya mata pelajaran al-Islam dan KeMuhammadiyah-an. Dengan konsep “identitas objektif pendidikan Muhammadiyah”, mata pelajaran ini dirancang untuk menjadi instrumen bagi Muhammadiyah dalam rangka menyemaikan karakter Islam moderat bagi peserta didiknya. Sementara NU mempunyai Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dengan ciri khas adanya mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an. Melalui konsep “SMP-Plus”, Lembaga Pendidikan Ma’arif NU merupakan wahana NU untuk menyemaikan karakter Islam moderat bagi para peserta didiknya. ablu mina Allah dan hablu minannas mungkin dasar yang harus,<sup>43</sup>

Perkembangan pemikiran keagamaan dalam bingkai NU, menunjukkan fenomena yang unik dan menarik. Kiat dalam

---

<sup>43</sup> file:///C:/Users/HP/Downloads/205-Article%20Text-1198-1-10-20170213%20(1).pdf. diakses tgl 26 November 2017, 22:35.

menghadang pemikiran Islam liberal, NU memiliki gagasan yang dikatakan menarik dan progresif, begitupun ketika merespons paham modernitas NU menggunakan basis pengetahuan tradisional dengan mempertahankan kultur yang mereka miliki. Menggabungkan dua pijakan antara ketradisonalan dan kemodernan, merupakan dua hal yang sangat komprehensif untuk menghadang paham-paham impor yang datang ke Indonesia. disamping itu NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lembaga pesantren. Tradisi tersebut dincontoh dari zaman Rasulullah ketika memberikan sanad hadis kepada para sahabat-sahabat Nabi, begitupun dengan NU, seorang guru/kiyai selalu menurunkan tradisi-tradisi kepada muridnya/santrinya untuk diteruskan sebagai estapet para ulama. Pantulah jika hal seperti ini dinamai *warosatul anbiya*.

NU merumuskan lima peran penting guna menciptakan generasi muda yang memiliki pemahaman Islam moderat, serta menetralsir pemahaman Islam radikal. Peran tersebut diantaranya

1. Lembaga pesantren, para kiyai, santri, dan para alumni pesantren yang menjadi pondasi *syari'at* serta sumber moralitas dan sumber kebijakan yang diperuntukkan berbagai kalangan masyarakat, dan bersifat universal.
2. Para intelektual NU yang lahir dari berbagai instansi pendidikan, serta ahli dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, dan memberikan kontribusi sosial terhadap pemahaman akan Islam moderat.
3. Para wirausaha yang berdiam di kawasan NU adalah para pengusaha NU yang kini semakin banyak dan semakin maju, diharapkan memberikan sumbangsing moril dan materil.

4. Tokoh birokrat yang latar belakangnya NU yang juga semakin banyak jumlahnya yang manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.
5. Tokoh politikus yang berasal dari Nu dan kini tersebar di berbagai partai politik di Indonesia dan mengisi posisi posisi strategis.<sup>44</sup>

NU juga mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai basis transisi keilmuan. Untuk menghadang dan menyelamatkan generasi muda dari paham Islam yang radikal dan di arakan kepada Islam yang moderat. Dengan berbagai kekhasan dan subkulturnya, pesantren sebagai lembaga yang komprehensif dalam mempelajari agama Islam. Pesantren membuktikan jatidirinya atas kebertahanan di tengah masyarakat yang nomaden. Meskipun dalam perkembangan terakhir, sistem pendidikan di pesantren maupun perguruan tinggi Islam yang berbasis NU juga perlu terobosan-terobosan baru dalam rangka memutus dikotomi antara pendidikan agama dengan teknologi. Hal tersebut harus dilakukan secara rutinitas, supaya system pendidikan Islam di Indonesia selalu mengalami peningkatan baik dai segi kualitas dan kuantitas.

Dalam bidang pendidikan Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai. Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai. Dengan demikian pesantren, Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat, kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada kualitas sumberdaya manusia harus

---

<sup>44</sup> Dinduh dari situs resmi Nahdlatul Ulama, <http://www.nu.or.id> diakses tgl 26 November 2017, 22:35.

ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Pendidikan Islam seperti pondok pesantren memberikan pengaruh dan sumbangsih terhadap sosio-kultural, dalam arti memberikan wawasan filosofi, arah pandangan motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru. Menyebarkan agama Islam kerbagai kalangan tetapi tetap memperhatikan keotentikan budaya setempat. Tanpa merusak, menghilangkan melainkan memperbaharui yang sudah ada menjadi lebih baik dan kompetitif.

Pendidikan Islam di pengaruhi oleh perubahan sosial dan lingkungan sosio-kultural dalam penentuan sistem pendidikan Pesantren adalah model pendidikan yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia, maka tidaklah heran ketika berbicara maslaha sejarah masuknya Islam ke Indonesia, maka dibahas pula awal muasal pondok pesantren di Indonesia. jika dilihat dari keberadaanya, pesantren merupakan institusi pendidikan dan dakwah agama Islam. Ia lahir ditengah-tengah masyarakat yang belum mengenal sekolah dan universitas. Dalam wacana ini, menjalankan fungsi pendidikan merupakan tugas pokok dari semua pesantren. Sementara itu fungsi agama dalam kehidupan diharapkan menjadi faktor pencerahan dan langit pelindung (the sacred canopy) bagi kehidupan manusia. Secara kultural pesantren merupakan embrio pendidikan Nahdlatul Ulama, akan tetapi komunitas pesantren masih memiliki keterbelakangan, oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren harus dilakukan langkah-langkah, antar lain:

1. mengkoreksi apa-apa yang berhubungan dengan pemahaman teologi aswaja;

2. Pengasuh pesantren hendaknya menjadi pioneer, seorang pelopor, dalam pengembangan dan kemajuan Pendidikan di pondok pesantren, dimana seorang santri dituntut ketika sudah menjadi seorang alumni, harus memiliki sikap moderat dan menebarkan keharmonisan dalam beragama. Tidak hanya menyenangkan umat tetapi juga mencerdaskanya;
3. Masyarakat pesantren harus segera malakukan transformasi nilai kepesantrenan dan membumikan pesan moral seperti: keikhlas, kebersamaan, kemandirian, dan semangat pembaharuan; dan Adanya hubungan timbal balik yang baik antara komunitas pesantren dengan aparatur negara dalam segala bidang.<sup>45</sup>

NU sebagai organisasi kemasyarakatan tidak boleh tidak harus terus menerus mengupayakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam konteks ini, yaitu:

5. NU sudah saatnya memiliki roadmap pengembangan sumberdaya manusia dalam 25-50 tahun ke depan. Road map ini penting dalam rangka memberikan arah pengembangan yang dilakukan NU dari waktu ke waktu.
6. Pengembangan kualitas pendidikan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi harus dilakukan secara terus menerus dengan tetap memegang teguh ruh ajaran-ajaran pokok ke-NU-an. Harapannya, di era globalisasi semacam ini warga NU tetap memiliki basis ideologi keaswajaan yang senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi. Terlebih, dengan perkembangan media sosial seperti sekarang ini ideologi-ideologi yang bertebaran menjadi semakin kompleks.

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*: 30.

7. Pengembangan ekonomi masyarakat NU yang diasaskan pada potensi lokal. Basis pengikut NU yang sebagian besar berada di pedesaan harus menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi umat. Kebangkitan ekonomi umat harus dimulai dari masyarakat desa yang kaya akan potensi ekonomi. Harapannya, masyarakat NU dari waktu ke waktu akan semakin baik tingkat ekonomi dan diharapkan akan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Ranah perjuangan NU mengacu pada Statuten Perkumpulan NU 1926 tidak saja berdimensi pada upaya ranah perjuangan yang bersifat "ideologis" yaitu memperjuangkan aswaja, tetapi juga memenangkan pertarungan untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih cerdas dan sejahtera.

NU melakukan staregi seperti membumikan buku-buku yang ke-NU-an, hal tersebut merupakan terobosan untuk menghadang buku-buku Islam radikal yang dikemas semenarik mungkin untuk memikan pembacanya. Tidak hanya buku tapi para pendahulu kita yang membumikan nilai-nilai keIslaman yang moderat. Hal tersebut dilakukan yang pastinya disesuaikan dengan pasar, masyarakat zaman sekarang menjadikan buku sebagai media paling utama dalam mempelajari berbagai hal termasuk belajar agama. Sudah tidak dihiraukan lagi apakah ada atau guru yang mengajarkan hal tersebut, selama masih bias otodidak dengan menggunakan beberapa media, maka dikatan abash dalam menuntu ilmu. Masyarakat kita suda bukan masyarakat pendengar sekarang masyarakat kita menjadi masyarakat pembaca. Dalam memberikan pemahaman NU terhadap internal UN sendiri sangatlah sulit karena bisa dikatakan pendidikan di kalangan NU sangat dimarjinalkan dan sangat rendah pemahaman.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Moh Mukri, *NU Mengawal Perubahan Zaman*, 2.

Strategi Muhammadiyah Dalam Membendung Ideologi Islam liberal. Muhammadiyah melakukan langkah yang sesuai dengan ideologinya yaitu dakwah, *amar makruf dan nahi mungkar*. Jadi, Siapa saja yang berperilaku mungkar jelas tidak segaris dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi moderat mengajak untuk berdialog mengenai masalah-masalah yang dipermasalahkan. Ketika Muhammadiyah melakukan *amar makruf dan nahi mungkar* disesuaikan dengan kultur keadaan masyarakat setempat, meninggalkan kekerasan, pemaksaan dan apapun itu bentuk kriminalitas. Penyampainya *amar makruf dan nahi mungkar* disampaikan dengan penuh harmoni dan sikap yang menunjukkan bahwasanya agama Islam bukan agama paksaan. Agama Islam merupakan agama yang mengedepankan kode etik dalam berdakwah menyemapikan visi Rasulullah, dengan penuh kehati-hatian.

Mengajak masyarakat untuk ditangani dengan menanamkan semangat *tasammuh* (toleransi) terhadap beda keyakinan, beda ideologi beda perilaku dan beracuan pada garis-garis aturan yang sudah berlaku. Karena perbedaan bukanlah suatu hal yang negative, melainkan perbedaan adalah rahmat. Tidaklah merasa bersalah ketika menghargai perbedaan orang lain, karena itulah salah satu etika kebebasan beragama, kebebasan berpaham dan kebebasan berbuat sesuai *syari'at* yang di bawa oleh Rasulullah. Dalam membendung Ideologi Islam radikal tersebut Muhammadiyah tidak pernah melakukan pembendungan secara riil akan tetapi lebih mengetatkan di intern warga Muhammadiyah. Sehingga dari sini anggota atau simpatisan Muhammadiyah ketika diajak pada perilaku radikal bisa mencegah untuk tidak terlibat didalamnya. Serta melindungi masyarakat-masyarakat awam yang tidak paham

akan permasalahan ini, tugas yang amat berat mempertahankan suatu ideologi umat.<sup>47</sup>

Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah. Pada tahap awal pertumbuhannya, Muhammadiyah membangun sekolah sebanyak mungkin. Pertimbangannya terlalu jelas, yakni kebodohan telah menjadi musuh terbesar umat Islam dan mustahil umat Islam dapat membangun masa depan yang lebih baik, jika kebodohan dan keterbelakangan tetap saja melekat lengket dalam kehidupan mereka. Muhammadiyah merintis sekolah umum sebanyak-banyaknya.

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah mampu melakukan pembaharuan dan pembangunan, jauh lebih dahulu dari negara, terutama melalui pendidikan. Penting diketahui, sejak beberapa tahun terakhir ini ramai dibahas tentang modal sosial. Melalui kekuatan modal sosial ini diharapkan dapat meringankan beban pembangunan di Indonesia yang selama ini mengandalkan modal finansial dan modal manusia atau human capital. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaruan Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Muhammadiyah memberikan titik tekan tersendiri bagi dunia pendidikan. Muhammadiyah berada di garda paling depan dalam mengembangkan pendidikan, pembangunan beberapa Universitas Muhammadiyah di Indonesia, bahkan mengalahkan pesaing-pesaing dari Universitas Islam yang lainya. Bahkan dalam waktu dekat ini telah diresmikan lahan untuk pembangunan Universitas Muhammadiyah yang letaknya di Jl. Soekarno Hatta Bandung. Adapun langkah-langkah yang

---

<sup>47</sup> Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, 190.

diambil Muhammadiyah demi meningkatkan kualitas pendidikan antara lain:

1. Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah, serta mempertinggi akhlak;
2. Memperteguh dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya;
3. Memajukan dan memperbarui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam;
4. Menggiatkan dan menggembirakan dakwah Islam serta amar ma'ruf nahi munkar;
5. Mendirikan, menggembirakan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf;
6. Membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi;
7. Membimbing para pemuda agar menjadi orang Islam berarti;
8. Membimbing ke arah kehidupan dan penghidupan sesuai dengan ajaran Islam;
9. Menggerakkan dan menumbuhkan rasa tolong menolong dalam kebajikan takwa;
10. Menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Pada dasarnya siapapun tidak mempunyai hak untuk melarang bahkan membubarkan organisasi untuk hidup dan berkembang di negara ini apapun bentuknya organisasi itu. Karena mewedahi diri dalam sebuah organisasi merupakan hak asasi manusia, kecuali organisasi tersebut bertentangan dengan UUD 45 jelas itu tidak ditolerir. Ketika organisasi tersebut meresahkan masyarakat maka harus diselesaikan secara hukum

---

<sup>48</sup><http://repository.uin-malang.ac.id/221/1/1c.%20M.%20In%27am%20Esha%20-%20Peran%20Strategis%20NU%20edit.pdf> diakses tgl 26 November 2017, 23:18.

tidak boleh masyarakat main hakim sendiri agar terjadi kedamaian walaupun hukum yang berlaku tidak memuaskan.

### **Tantangan yang dihadapi di Indonesia**

Tantangan yang dihadapi oleh Ideologi Islam moderat dalam konteks kekinian dan masa yang akan datang adalah fenomena berkembangnya ideologi Islam radikal. Secara garis besar, baik yang berbasis sekular maupun yang berbasis agama (Islam): Dua besar ideologi dimaksud adalah liberalisme di satu pihak dan radikalisme di pihak lainnya.

Ideologi liberal lahir dari sejarah panjang pemberontakan masyarakat Eropa. Pemberontakan ini melahirkan modernisme, materialisme, struktur masyarakat kapitalis. Kehadirannya siap menyapu masyarakat di negara-negara berkembang, dan mayoritas muslim terbesar di dunia termasuk Indonesia.

Ideologi Radikal berbasis agama (Islam). Ideologi ini berakar pada fundamentalisme dalam agama. Sementara fundamentalisme sendiri dicirikan oleh cara pandang tertentu yang menganggap aspek-aspek partial (*furu'*) dalam agama sebagai sesuatu yang fundamental; sehingga wajib diperjuangkan dengan jalan jihad (*qital*), hal seperti ini juga disebabkan oleh pemahan tekstual terhadap al-Qur'an yang dilakukan oleh beberapa madzhab dalam Islam, biasanya muncul dari aliran Salafis.

Ideologi radikal merupakan respons terhadap tidak terbendungnya kekuatan liberal atas umat Islam di berbagai negara. Pada sisi yang lain, secara psikologis sikap radikal ini bisa muncul dari kekecewaan, kecemasan dan ekspresi perasaan tidak berdaya dari sebagian umat Islam yang memiliki pandangan sempit terhadap agamanya. Sikap ini mendorong lahirnya semangat "perang" melawan hegemoni negara adi

daya dan kekuatan yang berafiliasi ideologis dengannya secara membabi buta.

Ideologi radikalisme telah merusak citra Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Sehingga melahirkan stigma negatif terhadap Islam sebagai agama yang intoleran, atau agama Islam dijuluki sebagai *Islmopobia*, ideologi radikalisme tidak menjunjung nilai-nilai kebebasan maupun nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Juga menjadi hambatan bagi jalan dakwah dan persatuan umat Islam.

Ideologi-ideologis di atas, menjadi ancaman serius bagi kesinambungan ideologi Islam yang moderat, toleran, seimbang dan adil itu. Tantangan ideologis tersebut seharusnya disikapi dengan serius dan bijaksana. Para pendukung ideologi Aswaja di Indonesia perlu mengkonsolidir gerakan nyata untuk meng-inseminasi nilai-nilai luhur yang diwariskan dalam ideologi ini kepada generasi muslim melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Selain itu, pemakmuran masjid dengan aktivitas ilmiah, dan sosial selain peribadatan juga sangat efektif untuk melestarikan nilai-nilai yang dikembangkan Aswaja. Karenanya perlu dirawat dan dijaga melalui upaya-upaya yang terarah unuk hal itu.

Secara mondial, kampanye Islam moderat dan *rahmatan lil'alamin*, harus diintensifkan dalam percaturan internasional untuk menghilangkan kesan yang salah dan merugikan terhadap Islam itu sendiri. Nahdlatul Ulama melalui forum ICIS (International Conference of Islamic Scholars) merupakan contoh yang baik dalam hal ini. Langkah serupa perlu dikembangkan dalam strategi lain seperti melalui para pelajar dan warga negara Indonesia di luar negeri sebagai duta Aswaja, dan seterusnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> [http://akamawa.unusa.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/MATERI-KULIAH-PAKAR\\_10-APRIL-2016.pdf](http://akamawa.unusa.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/MATERI-KULIAH-PAKAR_10-APRIL-2016.pdf) diakses tgl 27 November 2017, 01:05.

## **F. Usaha-usaha Yang Dilakukan oleh Agen Islam Moderat Adelaide**

Selain melakukan berbagai macam penelitian seperti dijelaskan sebelumnya, beberapa kegiatan akademik dilakukan CITE dalam mempromosikan Islam moderat di Australia. CITE memiliki dua kegiatan tahunan yang berkaitan dengan konferensi pendidikan Islam yaitu *Australian Islamic Education Forum* dan *Annual Australian Islamic Schooling Conference* serta satu program training dengan nama *New Teacher Training Program*. Tiga kegiatan ini mempunyai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi CITE agar ajaran Islam tidak disalahfahami bukan hanya oleh orang non-Muslim tetapi oleh Muslim di Australia terutama kalangan mudanya.

Nampaknya CITE menempuh jalan yang dianggap efektif dalam mempromosikan Islam yang kontekstual melalui jalur konferensi dan forum pendidikan serta program training guru-guru baru di Australia. Deskripsi lebih detail tentang ketiga kegiatan itu bisa dilihat dalam penjelasan di bawah ini.

### **1. *Australian Islamic Education Forum***

Kegiatan ini dilaksanakan di Melbourne Australia pada tanggal 24-25 Februari 2017, kerjasama antara CITE dengan Ilim College serta didukung oleh Islamic Schools Association (ISAA) of Australia dan Independent Schools Victoria (ISV). Tujuan dari forum ini adalah untuk membekali para pengajar di sekolah-sekolah Islam di Australia (guru di sekolah Islam, madrasah atau guru di rumah), tentang kerangka pikir pengajaran Islam, serta mendorong mereka untuk memiliki jaringan, membuat kerjasama dan kolaborasi, serta saling berbagi pengalaman tentang harapan dan praktek pengajaran di sekolah-sekolah Islam di Australia.

Forum ini dihadiri oleh lebih dari dua ratus guru agama Islam di seluruh Australia. Format forum ini di desain agar terjadi sharing dan interaktif ide diantara para peserta juga antara peserta dan pemateri. Dengan tema '*Continuity and Change: Envisioning the way forward for Islamic Schooling in the West*', kegiatan ini dipandang sebagai momen yang berharga bagi pengembangan pendidikan Islam di Australia.

Dylan Chown, direktur program Pendidikan Islam CITE mengatakan bahwa sekolah-sekolah Islam di Australia, sebagaimana juga sekolah-sekolah berlandaskan agama lainnya yang sudah lebih dulu ada di Australia, ada dalam periode negosiasi transisi dari fase pembentukan menuju fase baru pengembangan. Ketika membuka acara forum ini, Chown mengapresiasi tokoh-tokoh visioner yang telah merintis pendirian sekolah Islam di Australia 34 tahun yang lalu, dan kemudian Chown berbicara tentang periode pembaharuan pendidikan Islam. Ketika dikonfirmasi tentang hal ini di kantor CITE Adelaide, Chown menyebutkan bahwa:

“Pembaharuan atau renewal berhubungan dengan pencarian pemahaman yang lebih bernuansa tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan apa bentuknya dalam konteks pendidikan Australia kontemporer. Hal ini memerlukan sintesis prinsip-prinsip pendidikan yang berasal dari tradisi dengan praktek pendidikan kontemporer; dan memberikan lebih besar penekanan pada substansi praktek terbaik (best practice) di sekolah-sekolah Islam Australia (Wawancara, Adelaide 25 September 2017).

Sementara Aynur Simsirel, pimpinan Ilim College dan ketua ISAA, berkomentar terhadap kegiatan forum ini dengan mengatakan bahwa ada semangat dan energi yang hebat dari para pendidik di Australia untuk datang ke forum ini untuk

berbagi pengalaman dan mimpi dalam merealisasikan usaha bersama menciptakan sekolah-sekolah Islam yang berkualitas di Australia.

Abdalla, direktur CITE menyebutkan bahwa forum ini memberikan manfaat dalam membangun proyek kolaboratif proyek pengembangan pendidikan Islam tingkat nasional yang dipimpin oleh CITE bekerjasama dengan para pegiat pendidikan Australia untuk mengembangkan kurikulum sudi Islam yang kontekstual dan sesuai dengan standard pendidikan Australia pada umumnya.

Karena pentingnya kegiatan forum seperti ini, Abdalla ketika diwawancara dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) di kantornya di Adelaide menyebutkan bahwa forum ini akan terus dilanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 2018, CITE akan melanjutkan pertemuan forum ini dengan kegiatan bernama 2<sup>nd</sup> Australian Islamic Education Forum yang akan dilaksanakan di Adelaide pada tanggal 23-24 Februari 2018. Forum kedua ini bertemakan Islamic Schooling Renewal-A Focus on Curriculum. Nampaknya CITE berusaha untuk mengajak para pendidik di sekolah-sekolah Islam di Australia untuk melakukan refleksi, diskusi dan merancang bagaimana kurikulum sekolah Islam Australia bisa kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Beberapa pertanyaan kunci tentang arah pengembangan kurikulum pendidikan Islam menurut Abdalla akan dicoba dijawab pada forum ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana format pembaharuan kurikulum di sekolah-sekolah Islam di Australia? Bagaimana para guru di sekolah-sekolah Islam memaknai dan terlibat dalam Kurikulum Pendidikan Australia? Sejauhmana perkembangan kurikulum pendidikan Islam? Sejauhmana para pendidik di sekolah-sekolah Islam memformulasikan dan membuat kurikulum yang Islami? Dan apakah kurikulum yang

ada di sekolah-sekolah Islam sekarang ini sudah relevan dan kontekstual jika disandingkan dengan kurikulum nasional Australia?

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa CITE sangat concern terhadap kurikulum pendidikan Islam di Australia. CITE berharap bahwa para pendidik di sekolah-sekolah Islam menyadari posisi mereka sebagai agen-agen sosialisasi nilai-nilai Islam kepada anak didik yang harus ditunjang oleh kurikulum sekolah yang baik dan kontekstual. Kurikulum pendidikan Islam harus beradaptasi dan melakukan negosiasi yang saling melengkapi untuk membekali siswa-siswa Muslim dengan nilai Islam yang adaptif terhadap konteks Australia yang multikultur demikian Prof Abdalla menyebutkan (Wawancara 25 September 2017).

## ***2. Annual Australian Islamic Schooling Conference***

Selain kegiatan Forum Pendidikan Islam di atas, CITE juga memiliki kegiatan tahunan berupa konferensi pendidikan dengan nama Annual Australian Islamic Schooling Conference. Tahun 2017 ini, merupakan konferensi tahunan yang kedua. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 11-12 Juli 2017 di Mount Lofty House, Crafers, Adelaide-Australia Selatan. Konferensi ini nampaknya merupakan lanjutan dari kegiatan Australian Islamic Education Forum yang dilakukan di awal tahun (Februari 2017 di Melbourne) yang digagas oleh CITE. Buktinya, tema dari konferensi ini difokuskan pada kurikulum yang sebelumnya dibahas pada kegiatan forum pendidikan.

Abdalla (direktur CITE) dan Dylan Chown (direktur program kegiatan) menyebutkan bahwa acara ini sangat sukses. Menurut Abdalla, acara yang digagas dan disponsori oleh CITE ini bertujuan untuk membantu pendidikan Islam Australia dalam merespon masa transisi dari fase awal pembentukan

(establishment) menuju fase kemajuan dan pembaharuan (renewal) terutama dalam aspek kurikulum sekolah. Dalam sambutannya sebagai direktur CITE dalam acara pembukaan konferensi, Abdalla mengatakan bahwa sekolah Islam di Australia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam tiga decade terakhir, baik dari sisi siswa yang mendaftar maupun dari bertambahnya jumlah sekolah Islam. Sekolah-sekolah Islam di Australia dan juga di Negara-negara Barat pada umumnya dan sekarang sedang memasuki fase transisi menuju fase pembaharuan (renewal). Pembaharuan ini termasuk di dalamnya melakukan introspeksi serius tentang apa yang dimaksud dengan "Islami" dalam visi sekolah. Pandangan dunia, pendekatan pedagogis, model manajemen kelas, relevansi dan kontekstualisasi pengajaran Agama Islam dan Bahasa Arab. Bagi Abdalla, komunitas Islam Australia sebenarnya sudah memulai rencana pembaharuan sejak diadakannya Konferensi Tahunan Sekolah Islam yang pertama yang dilaksanakan pada tahun 2016. Dalam konferensi pertama itu sudah diputuskan untuk menuliskan roadmap sepuluh tahun proses pembaharuan pendidikan Islam di Australia. Karenanya, pada konferensi kedua ini sebut Abdalla, akan didiskusikan lebih lanjut tentang perubahan pendidikan Islam yang focus pada bidang kurikulum.

Konferensi ini nampaknya mendapatkan respon yang baik dari para akademisi Islam, tidak hanya dari Australia tapi dari beberapa negara lainnya. Tercatat ada para pemakalah yang datang dari Australia, Amerika Serikat, Kanada, Kesultanan Oman, Indonesia, Singapore, Uni Emirat Arab dan negara lainnya. Dua hari konferensi ini merupakan momen yang penting bagi akademisi yang terlibat kajian kurikulum sekolah Islam di negara-negara Barat. Agenda utama konferensi ini adalah

mengeksplorasi tema pembaharuan kurikulum di sekolah-sekolah Islam.

Pembicara kunci pada hari pertama konferensi, Dr Nadeem Memon (Director of Education at Abu Dhabi University Knowledge Group), dengan baik meringkas tujuan dan mantra usaha pembaharuan kurikulum dengan menantang para peserta seminar tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan. Dalam ungkapannya, Dr. Memon menyebut: “Acknowledge the past (Akui masa lalu).....Critique the present (Kritik masa kini)...Be part of the future (jadilah bagian dari masa depan”. Dalam presentasinya yang berjudul *Mapping Islamic School Curriculum*, Memon mempertanyakan model kurikulum spiral (spiral curriculum model) dan selanjutnya menyebutkan perlunya mengetahui satu model yang bias dijadikan acuan. Ia juga mengungkapkan pertanyaan kritis tentang apa itu pengetahuan, skill dan sikap yang menjadi penekanan pada kurikulum sekolah-sekolah Islam, serta menantang para peserta konferensi tentang sejauhmana tahapan yang sudah dilakukan dalam memetakan pengembangan kurikulum pendidikan Islam?

Pembicara kunci hari kedua Dr Seema Imam (Co-Chair of the National College of Education, at National Louis University), menekankan pentingnya kolaborasi yang terus menerus dalam menyusun kurikulum. Ia menyebutkan bahwa “No one person can write curriculum (tidak ada satu orang pun yang bias menulis kurikulum sendirian)”. Dalam presentasinya, Dr. Seema Imam juga berusaha membantu menghubungkan antara teori dan praktek serta berbagi pengalaman dari usaha-usaha integrasi yang dilakukannya dalam pengembangan kurikulum di sekolah Islam pada konteks Amerika Utara.

Pembicara lainnya, Aynur Simsirel (Principal Advisor, Independent Schools of Victoria, former Executive Principal of

Ilim College and Chair of Islamic Schools Association Australia), menawarkan sebuah dalih yang menggairahkan dengan menyebut bahwa: "Tokoh-tokoh pendidikan perlu menemukan pahlawan-pahlawan mereka di ruangan kelas (guru)...karena merekalah yang akan melakukan transformasi dan tanggungjawab utama pengajaran ada di pundak mereka...dan mereka ada di setiap ruangan di sekolah Islam". Simsirel juga berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam bidang kurikulum ini dengan topic presentasi *Curriculum in Australian Islamic Schools: Trends and Future Prospects*. Dia juga menawarkan rekomendasi berguna bagi para tokoh pendidikan di Australia dalam tugas mereka memimpin dan mendukung pembaharuan kurikulum.

Dr Deborah Price, (Senior Lecturer at UniSA and Executive Member at the Australian Curriculum Studies Association) mempresentasikan sesi yang sungguh informative dengan tema makalah *Australian Curriculum: Overview and Future Directions*. Dalam makalahnya, Price juga mengidentifikasi capaian-capaian dari Kurikulum Australia hubungannya dengan Diversitas Siswa (Student Diversity). Lebih jauh, pemakalah ini menyebutkan harapan dan kesempatan ke depan bagaimana kurikulum nasional Australia bisa diterapkan pada pendidikan Islam yang inklusif. Price juga menekankan fleksibilitas Kurikulum Australia.

Dylan Chown (Director Islamic Education, CITE, UniSA), mendiskusikan makalah dengan judul *Islamic World View and the National Curriculum: Can they be reconciled?*. Menurutnya, tantangan utama bagi sekolah-sekolah Islam adalah untuk terlibat dan melaksanakan Kurikulum Nasional Australia dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya, tetapi dengan modifikasi yang responsive terhadap kebutuhan khusus pada konteks pendidikan Islam. Hal ini tentu saja mensyaratkan

pemahaman yang mendalam dan perhatian yang lebih terhadap kurikulum baik yang diterapkan di tingkat Nasional Australia ataupun Negara Bagian. Di sisi lainnya, diperlukan juga pemahaman yang baik tentang aspek-aspek Islam termasuk Islamic Worldview dan pedagogi Islam. Dalam penutup makalahnya, Chowen menjelaskan tentang perlunya usaha dalam merekonsiliasikan antara Islamic Worldview dengan Kurikulum Nasional. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan tanpa memahami dengan jelas apa itu Islamic Wordview dan bagaimana Muslim memahami eksistensi dan tujuan mereka di dunia.

Pembicara lainnya mempresentasikan pengalaman masing-masing dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolah Islam pada konteks Negara yang berbeda-beda. Pioner pendidikan Islam Dr Tasneema Ghazi (IQRA' International Educational Foundation), misalkan mempresentasikan pengalaman implementasi kurikulum di Amerika Serikat dengan judul presentasi *Islamic Education Curriculum: the USA experience*. Dr Muhammad Zuhdi, (Vice Dean for Academic Affairs at the Faculty of Education, State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) mempresentasikan makalah dengan topic implementasi kurikulum penghapalan Al-Quran di Indonesia dengan judul *Tahfizh Curriculum: A Sociological Approach*. Dr Anke Iman Bouzenita dan Dr Mohsin al-Salimi (Sultan Qaboos University), mempresentasikan makalah dengan judul *The Islamic Education Curriculum in the Sultanate of Oman - Integrating diversity*.

Presenter lainnya, Nadia Selim (PhD Candidate, CITE, UniSA), dan Associate Professor Angela Scarino, mempresentasikan topic yang menarik dengan judul *What would an Islamic school Arabic curriculum look like?*. Topik ini menjeaskan tentang signifikansi pengajaran bahasa terutama Bahasa Arab

dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah Islam. Dr Ibrahim Diallo (UniSA), mempresentasikan makalah dengan judul *Islamic community schools (Madrassahs) in Australia: a case of a contextually responsive curriculum*. Sementara direktur CITE, Prof Mohamad Abdalla mempresentasikan makalah berjudul *National Islamic studies curriculum: Process, expectations, quality control*. Dalam presentasinya, Abdalla mendorong perlunya proyek studi Islam secara nasional atau *National Islamic Studies project*.

Konferensi ini dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya perwakilan-perwakilan sekolah Islam yang ada di seluruh Australia seperti dari Australia Barat: Australian Islamic College; dari Australia Selatan: Garden College; dari Negara bagian Queensland: Islamic College of Brisbane, Australian International Islamic College - Durack and the Gold Coast; dari Negara bagian New South Wales: Al Noori College, Arkana College, Unity Grammar, Irfan College, Australian International Academy, Australian Islamic College of Sydney; dari Victoria: Al Siraat College, Ilim College, Minaret College, East Preston Islamic College; dan dari Australian Capital Territory: Islamic School of Canberra.

Konferensi itu juga seperti dijelaskan direktur CITE Abdalla, juga mengeksplorasi beberapa sub-tema yang berkaitan dengan kurikulum, model-model kontemporer, perspektif kurikulum lintas agama, praktek inovatif pengajaran Bahasa Arab dan studi Islam serta pentingnya pedagogi dan kepemimpinan dalam menerapkan sebuah kurikulum yang berkualitas.

Beberapa pertanyaan besar menurut Abdalla muncul dalam konferensi ini diantaranya apakah sebenarnya maksud dan tujuan adanya sekolah Islam di Australia? Bisakah kita mengartikulasikan cetak biru Islamic Worldview? Bisakah pada akhirnya kita memformulasikan sebuah model kurikulum

Islam? Dan pertanyaan-pertanyaan penting lainnya yang muncul dalam dua hari konferensi yang bermakna itu. Konferensi ini juga menghasilkan sesuatu yang penting yaitu lahirnya steering komite yang bertugas untuk melakukan proses konsultasi, mendesign dan mengembangkan apa yang disebut dengan *National Islamic Studies Curriculum*.

Akhirnya, Prof Abdalla menyebutkan bahwa CITE yang dia pimpin akan bekerjasama dengan beberapa lembaga Islam seperti Islamic Schooling Association of Australian (ISAA) akan terus bekerja dalam proses pembaharuan sekoah-sekolah Islam agar sekolah-sekolah Isla di Australia semakin maju dan menjadi model bagi sekolah-sekolah Islam di Negara Barat lainnya di dunia. Untuk hal itu, di tahun-tahun ke depan, CITE akan terus melanjutkan kegiatan tahunan ini.

### **3. *New Teacher Training Program***

Selain dua kegiatan forum dan konferensi di atas, dalam promosinya menyebarkan Islam yang moderat dan adaptif dengan konteks multicultural Australia, mulai tahun 2018, CITE dan School of Education, University of South Australia (UniSA) menawarkan program pembelajaran baru yang bersipat on-line. Program ini diyakini akan menarik bagi guru atau calon guru di sekolah Islam juga para pengajar siswa Muslim di sekolah-sekolah lainnya. Ada dua program yang ditawarkan CITE. Pertama, program Master of Teaching yang memberikan jalan bagi seseorang untuk menjadi guru di Australia dengan spesialisasi pedagogi Islam bagi mereka-mereka yang mempunyai latar belakang sarjana S1 yang relevan. Kedua, program Graduate Diploma in Education (Islamic Education) yang menawarkan program pengajar profesional bagi para guru agar memahami kebijakan, standard dan prakek pendidikan kontemporer dengan kerangka pikir pedagogi Islam.

Program ini merupakan respon CITE akan perlunya program training guru dan program pengajaran professional dalam bidang pedagogi Islam di fakultas pendidikan. Bagi mereka yang tidak familiar dengan istilah pedagogi Islam, istilah ini merujuk kepada prinsip-prinsip pendidikan yang berasal dari tradisi Islam yang menjelaskan apa yang diajarkan, dipelajari serta cara mengajar. Jika merujuk kepada Konferensi Dunia Pertama Tentang Pendidikan Islam di Mekkah tahun 1977, kebutuhan akan program pendidikan guru telah diidentifikasi sejak dulu. Direktur Program Pendidikan Islam Cite, Dylan Chown menekankan bahwa kedua program studi yang baru ini merupakan “langkah penting dan capaian yang signifikan untuk bidang ilmu pendidikan. Dua program studi ini merupakan hasil inspirasi kolektif, kerja keras dan doa dari para peminat kajian ini baik ditingkat nasional maupun internasional” (Wawancara Tanggal 24 September 2017 di Adelaide).

Program CITE-UniSA yang baru ini merupakan pengakuan akan tradisi pendidikan Islam yang sangat kaya dan luas. Mahasiswa dalam program ini akan mempelajari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Sina dan Zarnuji selain mempelajari pemikiran-pemikiran tokoh lainnya seperti Dewey dan Vygotsky. Para mahasiswa juga akan dikenalkan kepada pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam kontemporer seperti Naquib Al-Attas dan Seyyid Hossein Nasr. Program ini akan mengenalkan mahasiswa tentang epistemology, filsafat dan pedagogi (metode pengajaran) dan perspektif pengajaran dari warisan keilmuan pendidikan Islam yang kaya yang digabungkan dengan konteks pendidikan kontemporer yang lebih luas.

Para mahasiswa bias mempelajari dan mengambil mata kuliah pedagogi Islam seperti *'Principles and Praxis'*,

*'Contemporary Issues and Muslim Students in the Classroom', 'Quality Teaching and Learning', 'Managing Learning Environments' and 'Critical Perspectives on Curriculum, Pedagogy and Assessment'.* Para mahasiswa juga bias mempelajari mata kuliah yang berhubungan dengan tradisi Islam seperti mata kuliah *'Introduction to Islam', 'Empires of Islamic Civilisation', dan 'Advanced Studies in Islam & International Relations' atau 'Advanced Studies of Sharia'.*

Tujuan program ini adalah untuk menyediakan training dan pembelajaran professional yang responsive terhadap konteks dan kebutuhan siswa Muslim di Australia. Program ini bukan mempersempit atau membatasi cakupan pendidikan dan kurikulum, tetapi justru memperdalam dan memperluas keilmuan pendidikan dan pengajaran dengan cara mengintegrasikan aspek atau dimensi agama, budaya dan spiritual.

Apa signifikansi program yang ditawarkan CITE ini bagi sekolah Islam? Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari sekolah-sekolah Islam adalah hampir sama dengan sekolah-sekolah lain yang berbasis agama seperti sekolah Katolik dan Sekolah Yahudi, yaitu untuk membantu menghubungkan antara keimanan dan menyiapkan siswa agar memainkan peran aktif dan positif di masyarakat.

Meskipun perkembangan sekolah-sekolah Islam di Australia sangat tinggi seperti di Amerika Serikat, Afrika Selatan dan New Zealand, sampai hari ini di Australia belum ada jurusan atau program pendidikan guru yang formal dan terakreditasi untuk para guru sekolah Islam atau guru bagi para pelajar Muslim secara umum. Tentu saja ada program seperti ini di beberapa bagian dunia Islam, tetapi sebuah lembaga formal yang terakreditasi belum banyak ditemukan.

Ahli pendidikan Islam yang terkenal di dunia internasional Dr Nadeem Memon, menyebutkan bahwa guru-guru di sekolah agama selain Islam, tidak seperti di sekolah-sekolah Islam, detraining secara khusus tentang tujuan pedagogis, mengajarkan nilai agama dan keyakinan, serta strategi instruksional untuk menanamkan kesadaran keimanan pada siswa. Sementara itu, di sekolah-sekolah Islam banyak ditemukan guru-guru yang heroic punya semangat tinggi mengajarkan nilai-nilai Islam tapi kurang memperhatikan standard serta perkembangan keahlian guru dalam hal pedagogis.

Menurut Abdalla (direktur CITE), dalam tiga puluh lima tahun sejarah sekolah Islam di Australia dan lebih dari tujuh puluh lima tahun sejarah di Amerika Utara, tidak pernah ada lembaga yang mempersiapkan training guru-guru Islam yang terakreditasi secara formal atau lembaga professional yang membekali guru sekolah Islam dengan pemahaman pedagogi Islam (Wawancara tanggal 25 September 2017). Tentu saja hal ini bukanlah kritik, tetapi merupakan refleksi akan perlunya diadakan sebuah training formal yang secara institusi terakreditasi untuk mempersiapkan calon-calon guru di sekolah-sekolah Islam terutama di Negara-negara minoritas Muslim atau Negara Barat.

Sementara Dylan Chown (Director Islamic Education, CITE, UniSA) membagi pengalamannya tentang program serupa yang ada sekolah-sekolah Katolik di Australia. Chown mengatakan: "kolega-kolega kita di pendidikan Katolik telah merancang sebuah training bagi calon-calon guru agama dan sejak lama mereka sudah memiliki akses terhadap program pendidikan guru yang professional untuk dipersiapkan menjadi guru-guru terbaik di sekolah-sekolah Katolik" (Wawancara 24 September 2017). Seluruh guru tetap di sekolah-sekolah Katolik

di Australia telah memiliki ijazah professional guru agama katolik atau *Graduate Certificate in Catholic studies*, paling telat dalam lima tahun pertama mereka ditugaskan menjadi guru. Pengalaman Katolik inilah menurut Chown salah satunya yang menginspirasi CITE-UniSa untuk menawarkan program Graduate Diploma in Education (Islamic Education) yang bertujuan untuk mempersiapkan calon-calon guru professional yang mengajar di sekolah-sekolah Islam di Australia.

Dengan melihat tiga program pendidikan Islam yang dilakukan oleh CITE di atas, tampak jelas bahwa CITE memiliki program strategis dalam mengkampanyekan dan mempromosikan Islam yang kontekstual serta Islam moderat yang adaptif terhadap konteks Australia. CITE tidak hanya menjadikan siswa-siswa sekolah sebagai obyek promosi Islam moderat tetapi juga menjadikan calon-calon guru sebagai agen yang membantu mempromosikan hal tersebut kepada siswa-siswa Muslim dan non-Muslim di Australia.

Program strategis ini dalam jangka panjang bisa mengklarifikasi persepsi siswa khususnya dan masyarakat Australia pada umumnya tentang Islam dan Muslim yang sering disalahfahami. Melalui perubahan kurikulum di sekolah serta menyiapkan training bagi calon-calon guru, maka CITE sudah membantu menyiapkan agen-agen dalam menyebarkan Islam yang sebenarnya yang seringkali dipersepsikan negative oleh public Australia, apalagi oleh siswa-siswa yang tidak mengetahui apa itu Islam dan Muslim yang sebenarnya.

Jika melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Abe W. Ata (2011) dengan judul *Persepsi Tentang Muslim dan Islam di Sekolah-sekolah Australia: Sebuah Survey Nasional (Perseption of Muslims and Islam in Australian Schools: A National Survey)*, maka apa yang dilakukan oleh CITE diharapkan bisa mengubah persepsi-persepsi tersebut.

Dalam penelitiannya, Ata mengajukan sembilan puluh item kuesioner kepada pelajar-pelajar non-Muslim di Australia. Siswa yang berpartisipasi dalam penelitian itu sebanyak 1000 siswa yang terdaftar di 20 sekolah menengah di seluruh Australia. Siswa yang berpartisipasi adalah siswa yang duduk di kelas 10-12. Pilot proyek penelitian ini dilakukan pada 9 sekolah dengan 552 siswa dan survey yang lebih pendek dilakukan di 13 sekolah dengan 682 siswa. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa tentang Islam dan Muslim.

Hasil penelitian Ata menunjukkan bahwa, ketika responden atau para siswa ditanya tentang apa kata pertama yang muncul dalam pikiran anda ketika kata Muslim disebutkan, 82 persen responden menjawab atau memberikan komentar yang negative dengan rincian 41% menjawab mereka berbeda dengan kita, 10% menyebut terrorisme, 10% menyebut terrorisme dan komentar negative lainnya, 8% menyebutkan komentar negative selain terrorism, 13% menyebut penampilannya berbeda dengan kita.

Dalam penelitiannya Ata berkesimpulan bahwa miskonsepsi tentang Islam dikalangan siswa non-Muslim Australia disebabkan karena kekuatan media dalam membangun imej negative tentang Islam dan Muslim. Ketidaktahuan siswa tentang apa itu Islam dan Muslim menyebabkan persepsi mereka hanya dibentuk oleh media baik televisi, Koran maupun media social lainnya. Bagi Ata, sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan rasa saling menghormati dan saling memahami perbedaan keyakinan dan kultur siswa dan public Australia secara umum. Karenanya, disinilah signifikansi program dan training guru yang dilakukan oleh CITE dalam mengurangi atau mereduksi miskonsepsi tersebut.

## **BAB IV KESIMPULAN**

Di Indonesia, Islam Moderat dan Islam Nusantara telah menjadi isu utama dalam Kementerian Agama di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan kunjungan ke beberapa Perguruan Tinggi, Menteri Agama selalu menyerukan promosi Islam Moderat dan berharap besar PTKIN/S berperan besar dalam peneguhan Islam Moderat. Dan hal itu dianggap wajar mengingat keberadaannya yang cukup signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari segi kuantitas, PTKIN terdiri dari 11 Universitas Islam Negeri (UIN), 11 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan 18 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Adapun PTKIS terdiri dari 52 Institut Agama Islam (IAI), 546 Sekolah Tinggi (ST), dan 96 Universitas.

Ada empat peristiwa deklarasi kampus di bawah Kementerian Agama; pertama, Deklarasi Aceh 26 April 2017 yang disepakati oleh 55 pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia; kedua, Deklarasi Anti Radikalisme 6 Juli 2017 di Surabaya yang diikrarkan sejumlah Perguruan Tinggi; ketiga, Deklarasi Anti Radikalisme 14 Juli 2017 di Bandung yang disepakati 44 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Barat; keempat, Deklarasi Islam Moderat Bandung 6 Agustus 2017 yang disepakati oleh 23 Dekan Fakultas Ushuluddin PTKIN se-Indonesia. Deklarasi ini lebih spesifik berkomitmen mewujudkan nilai-nilai Islam Moderat di perguruan tinggi. **Deklarasi Bandung I**, Forum Dekan Fakultas Ushuluddin PTKIN, pada butir ke-3, menyatakan: *“Bertekad melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam Moderat dan rahmatan lil-alamin dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi”*.

Oleh karena itu, Fakultas Ushuluddin (sebagai fakultas yang mengkaji pokok-pokok keilmuan Islam) diajarkan beberapa Mata Kuliah yang membentuk pemahaman bahwa dimensi Islam itu luas, tidak hanya sekedar ibadah ritual. Di sini para mahasiswa dihantarkan pula kepada keragaman/kebinekaan dalam memahami Islam, dengan merujuk realita kemunculan beberapa aliran (teologi, tafsir, fiqih, politik, filsafat, dan lain-lain) dalam memahami Islam. Tidak cukup sampai di situ, mahasiswa seolah diajak masuk ke dalam pusaran perdebatan dalam memahami Islam, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa keragaman itu alami dan wajar bahkan mendatangkan rahmat.

Beberapa aksi nyata yang dilakukan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam dalam upayanya mensosialisasikan Islam Moderat, yaitu: pertama, menyajikan beberapa mata kuliah yang berujung pada Islam Moderat; kedua, pengarusutamaan 'Islam Moderat dan Islam Nusantara' sebagai 'Tema Penelitian' baik penelitian dosen maupun mahasiswa; ketiga, mengarahkan 'Pengabdian Masyarakat' ke desa-desa binaan, terutama di desa-desa yang bersinggungan dengan komunitas non-muslim (Misalnya Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat); keempat, bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) untuk mensinergikan sosialisasi Islam Moderat di tengah-tengah masyarakat; kelima, bekerjasama dengan forum-forum yang fokus pada isu-isu toleransi dan kedamaian (seperti dengan Forum Komunikasi Umat Beragama/FKUB).

Semua aksi nyata yang dilakukan oleh Fakultas Ushuluddin tersebut, sebagai upaya-upaya untuk mensosialisasikan dan mendidik mahasiswa maupun masyarakat secara umum untuk memahami dan mempraktekkan Islam moderat dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping sebagai Lembaga

pendidikan tinggi, agar dapat berkontribusi sebagai *think tank* tentang rumusan kurikulum Islam moderat itu sendiri melalui penelitian-penelitian yang berkualitas. Dan yang lebih penting dari itu semuanya adalah regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri dalam mensukseskan pengajaran Islam moderat.

Sedangkan di Adelaide Australia Selatan, salah satu agen yang mempromosikan Islam moderat adalah CITE (*Centre for Islamic Thought and Education*) atau Pusat Pemikiran dan Pendidikan Islam. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Fakultas pendidikan atau Faculty of Education, University of South Australia. Lembaga ini sangat penting keberadaannya untuk mengklarifikasi imej negative tentang Islam di Barat pada umumnya dan masyarakat Australia pada khususnya. (CITE) menjadi kendaraan yang *powerful* yang akan membantu mengkontekstualisasi pemahaman Islam bagi masyarakat Australia sehingga bisa bekerjasama dan bukan bersebrangan dengan konteks masyarakat Australia yang multikultur.

Sebagai Lembaga di Perguruan Tinggi CITE banyak melakukan program-program penelitian. Fokus Riset CITE mulai dari 'Hubungan Islam dan Barat' Sampai Kekerasan Domestik. Di samping itu, CITE telah melakukan aksi-kasi nyata dengan tiga program pendidikan; *pertama*, program '*Australian Islamic Education Forum*', program ini untuk membekali para pengajar di sekolah-sekolah Islam di Australia (guru di sekolah Islam, madrasah atau guru di rumah), tentang kerangka pikir pengajaran Islam; *kedua*, program '*Annual Australian Islamic Schooling Conference*', program ini untuk membantu pendidikan Islam Australia dalam merespon masa transisi dari pase awal pembentukan (establishment) menuju fase kemajuan dan pembaharuan (renewal) terutama dalam aspek kurikulum

sekolah; ketiga, program '*New Teacher Training Program*', program ini adalah untuk menyediakan training dan pembelajaran professional yang responsive terhadap konteks dan kebutuhan siswa Muslim di Australia. Program ini bukan mempersempit atau membatasi cakupan pendidikan dan kurikulum, tetapi justru memperdalam dan memperluas keilmuan pendidikan dan pengajaran dengan cara mengintegrasikan aspek atau dimensi agama, budaya dan spiritual.

Dengan melihat tiga program pendidikan Islam yang dilakukan oleh CITE di atas, tampak jelas bahwa CITE memiliki program strategis dalam mengkampanyekan dan mempromosikan Islam yang kontekstual serta Islam moderat yang adaptif terhadap konteks Australia. CITE tidak hanya menjadikan siswa-siswa sekolah sebagai obyek promosi Islam moderat tetapi juga menjadikan calon-calon guru sebagai agen yang membantu mempromosikan hal tersebut kepada siswa-siswa Muslim dan non-Muslim di Australia.

Beberapa program strategis CITE diharapkan dalam jangka panjang bisa mengklarifikasi persepsi siswa khususnya dan masyarakat Australia pada umumnya tentang Islam dan Muslim yang sering disalahfahami. Melalui perubahan kurikulum di sekolah serta menyiapkan training bagi calon-calon guru, maka CITE sudah membantu menyiapkan agen-agen dalam menyebarkan Islam yang sebenarnya yang seringkali dipersepsikan negative oleh public Australia, apalagi oleh siswa-siswa yang tidak mengetahui apa itu Islam dan Muslim yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LkiS, 2014).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009).
- Akbarzadeh, Shahram, *Islam in Australia, in Australia and the Arab world*, (I. B. Tauris, London, England, 2009)
- Andrew Jakubowicz, "Political Islam and the Future of Australian Multiculturalism" *National Identities Journal*, Volume 9, 2007 - Issue 3: 'National Identity and Diversity'
- Anthony Moran, "Multiculturalism as nation-building in Australia: Inclusive national identity and the embrace of diversity, *Ethnic and Racial Studies*, Volume 34, 2011 - Issue 12.
- Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2003)
- Delhpine Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy: Transcending the State*, 2015, Routledge.
- Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015).
- Melalatoa, M.Yunus. *Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia*. Jilid L-Z. 2002.
- Myengkyo Seo, "Defining 'religious' in Indonesia: toward neither an Islamic nor a secular state", *Journal of Citizenship Studies*, Volume 16, 2012 - Issue 8: Secularism and Citizenship Beyond the North-Atlantic World.

- R.E. Elson, "Nationalism, Islam, 'secularism' and the state in contemporary Indonesia", *Australian Journal of International Affairs*, Volume 64, 2010 - Issue 3: Religious nationalism and nation-building in Asia.
- R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 55, No. 3 (Aug., 1996), pp. 613-634.
- Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam: Menguatkan Epistemologi Islam dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

#### **SUMBER INTERNET**

- Imam Pratio, Sejarah Islam di Australia, 8 april 2011, <https://islam33.wordpress.com/2011/04/08/sejarah-islam-di-australia/>, Diakses 26 April 2017.
- M. Hilaly Basya, *Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia*, <http://www.205-Article%20Text-1198-1-10-20170213.pdf>. diakses tanggal 25 November 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, software, offline.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia, *Kebebasan Agama di Australia*, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan\\_beragama.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html), diakses 28 April 2017.
- Kedutaan Besar Australia Indonesia, *Muslim di Australia*, [http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/Muslim di Australia.html](http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/Muslim%20di%20Australia.html), diakses 28 April 2017.
- Rakhmat Nur Hakim, "Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi Dan Radikalisme", opini Kompas Online, 1 Agustus 2016,

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme?page=all>, diakses 05 Oktober 2016.

Sensus Penduduk 2010. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Lihat <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id>, diakses 25 April 2017.

Web Resmi NU. <http://www.nu.or.id> diakses tgl 26 November 2017.

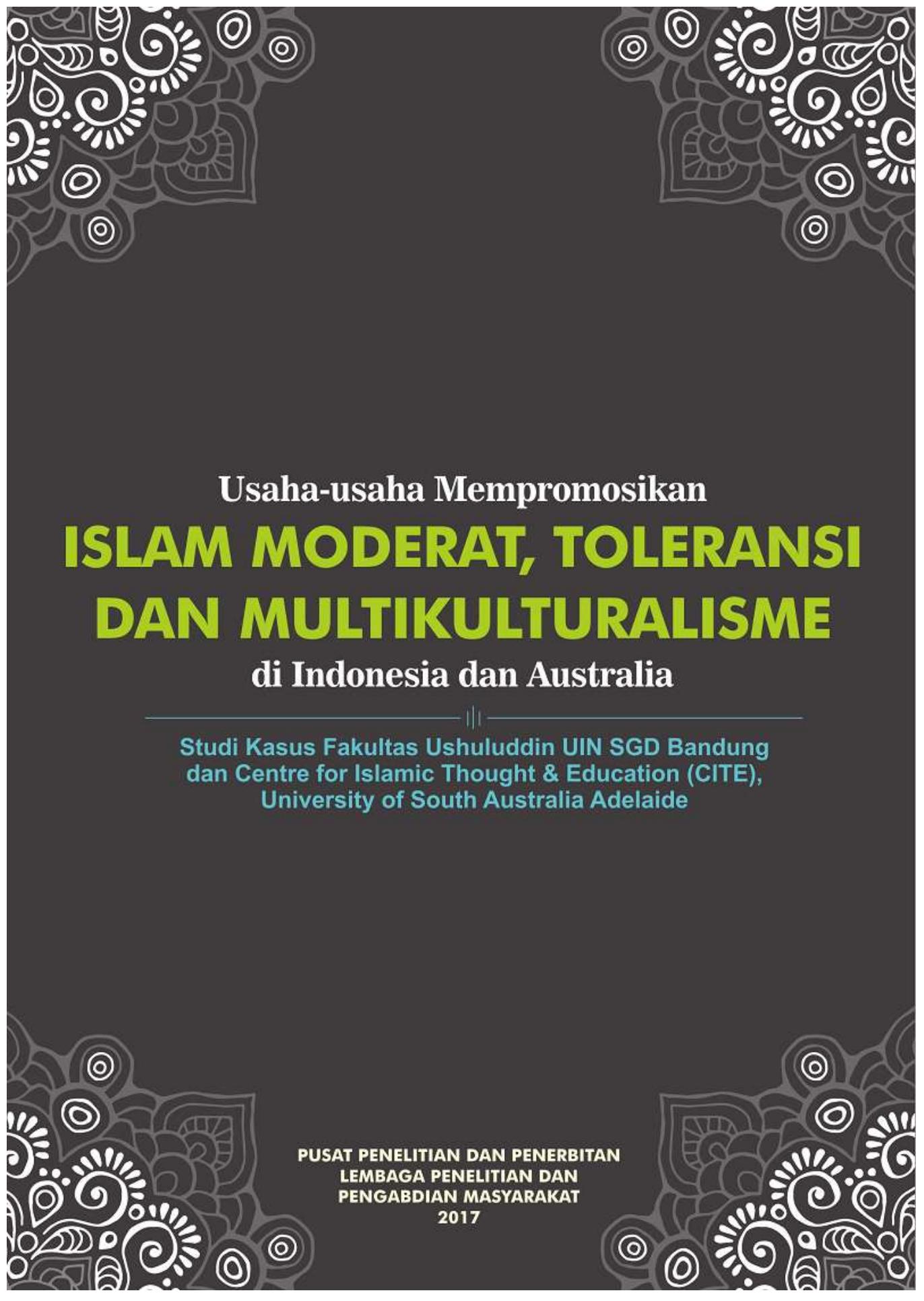
Web Resmi Muhammadiyah. <http://www.muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah.html>, diakses tgl 26 November 2017, 11:29.

[file:///C:/Users/HP/Downloads/205-Article%20Text-1198-1-10-20170213%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/205-Article%20Text-1198-1-10-20170213%20(1).pdf). diakses tgl 26 November 2017, 22:35.

<http://repository.uin-malang.ac.id/221/1/1c.%20M.%20In%27am%20Esha%20-%20Peran%20Strategis%20NU%20edit.pdf>) diakses tgl 26 November 2017, 23:18.

[http://akamawa.unusa.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/MATERI-KULIAH-PAKAR\\_10-APRIL-2016.pdf](http://akamawa.unusa.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/MATERI-KULIAH-PAKAR_10-APRIL-2016.pdf)) diakses tgl 27 November 2017, 01:05.

<Http://www.205-Article%20Text-1587-4-10-20171106.pdf>, diakses tgl 26 November 2017. 08:37



Usaha-usaha Mempromosikan  
**ISLAM MODERAT, TOLERANSI  
DAN MULTIKULTURALISME**  
di Indonesia dan Australia

---

Studi Kasus Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung  
dan Centre for Islamic Thought & Education (CITE),  
University of South Australia Adelaide

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
2017